

## 2001 Highlight

	2001	2000
<b>Total Penawaran Umum (Jumlah)</b> Total Public Offerings (Number)	32	63
<b>Penawaran Saham Perdana (Rp Triliun)</b> Initial Public Offerings (Rp Trillion)	1.11	1.8
<b>Penerbitan HMETD (Rp Triliun)</b> Right Issue (Rp Trillion)	4.18	17.57
<b>Penawaran Obligasi/Obligasi Konversi (Rp Triliun)</b> Bonds/Convertible Bonds Offering (Rp Trillion)	2.88	5.6
<b>Total Nilai Kekayaan Bersih Reksa Dana (Rp Triliun)</b> Total Net Asset Value of Investment Funds (Rp Trillion)	6.818	5.516
<b>Kapitalisasi Pasar BEJ (Rp Triliun)</b> JSX Market Capitalization (Rp Trillion)	239.27	259.62
<b>Perdagangan Tahunan BEJ (Rp Triliun)</b> JSX Annual Trading (Rp Trillion)	97.52	122.775
<b>Kapitalisasi Pasar BES (Rp Triliun)</b> SSX Market Capitalization (Rp Trillion)	197.90	225.80
<b>Perdagangan Tahunan BES (Rp Triliun)</b> SSX Annual Trading (Rp Trillion)	2.72	9.98
<b>Denda Dikenakan Terhadap Emiten (Rp Miliar)</b> Fines Imposed on Issuers (Rp Billion)	2.745	13.236
<b>Denda Dikenakan Terhadap Perusahaan Efek (Rp Miliar)</b> Fines Imposed on Securities Companies (Rp Billion)	0.008	0.145

## Sambutan Ketua

### Chairman Statement



Herwidayatmo

Kelesuan yang melanda aktivitas bursa sepanjang tahun 2001 tidak menyurutkan komitmen Bapepam bersama pelaku pasar untuk terus berupaya melakukan penyempurnaan dan pembenahan di berbagai bidang

The slowing down clouding market activities all year long in 2001 did not discourage Bapepam and other market participants from fulfilling their commitments to complete and reorganize the tasks at hand

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2001 masih sangat rentan dengan berbagai peristiwa politik dan gejolak sosial yang terjadi di tanah air. Sejak awal tahun, eskalasi politik yang semakin meningkat ditambah dengan berbagai reaksi sosial terhadapnya berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja Pasar Modal Indonesia pada paruh pertama di tahun 2001 yang berpuncak pada peralihan kepemimpinan nasional dari Abdurrahman Wahid kepada Megawati Soekarnoputri menjelang minggu terakhir di bulan Juli 2001. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta mencapai level 470,22 pada bulan tersebut - tertinggi sepanjang tahun 2001.

During the year 2001, Indonesian economy was still susceptible to various domestic political events and social instability. As the year kicked off, political escalation intensified and soon followed by a series of social responses which was significantly affecting performance of Indonesian Capital Market during the first half of the year and eventually led to national leadership transfer from Abdurrahman Wahid to Megawati Soekarnoputri by the end of July. The composite stock price index touched the level of 470.22 in that month—the highest during the year.

## Sambutan Ketua

Kegairahan baru dan optimisme pelaku pasar dalam menyikapi perubahan politik di tanah air tersebut tidak berlangsung lama. Menyusul tragedi 11 September yang menimpa dua bangunan di Amerika Serikat, World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC, Pasar Modal Indonesia kembali terkoreksi dengan menurunnya beberapa indikator bursa seperti nilai kapitalisasi pasar, nilai transaksi harian, dan persentase volume transaksi asing di bursa.

Meskipun demikian, dapat dicatat bahwa masih terdapat beberapa indikator pasar lainnya yang sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya antara lain volume transaksi, jumlah Emiten baik emiten saham, obligasi, maupun Reksa Dana, dan jumlah dana yang dikelola Manajer Investasi. Pertumbuhan juga terjadi dari sisi jumlah pelaku dan profesi penunjang yang berkecimpung di Pasar Modal Indonesia.

Kelesuan yang melanda aktivitas bursa sepanjang tahun 2001 tidak menyurutkan komitmen Bapepam bersama pelaku pasar untuk terus berupaya melakukan penyempurnaan dan pembenahan di berbagai bidang, khususnya hal-hal yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya serta sejalan dengan yang telah dicanangkan dalam Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000-2004.

Upaya tersebut antara lain di bidang pengenalan instrumen baru di pasar modal berupa peluncuran LQ-45 Futures Index atau Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) yang mulai aktif diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya sejak 13 Agustus 2001. Keberadaan instrumen baru tersebut cukup diminati pemodal dilihat dari rata-rata nilai perdagangan yang mencapai Rp 6,3

Yet, the enthusiasm and optimism demonstrated by market participants responding to local momentous shift in political landscape was short-lived. The ensuing September 11 tragedy on a couple of the United States' landmarks, the World Trade Center in New York City and Pentagon in the Washington DC, pushed Indonesian Capital Market to a setback marked with a slump of major market indicators such as market capitalization, daily transaction value, and percentage of foreign trading participation.

However, some other indicators such as transaction volume, total number of issuers both for equities and bonds issues as well as investment funds, and total funds managed by investment managers recorded a slight increase. An encouraging growth was also noted on the increasing number of participants and supporting professionals taking part in Indonesian Capital Market.

The slowing down clouding market activities all year long in 2001 did not discourage Bapepam and other market participants from fulfilling their commitments to complete and reorganize the tasks at hand especially those which already planned in the preceding years or those stated in the Blue Print of Indonesian Capital Market 2000-2004.

One of the commitments was materialized in the form of launching a new instrument called LQ-45 Futures Index in the Surabaya Stock Exchange (SSX) on August 13, 2001. This incoming securities was cheerfully celebrated by investors as proven by its daily transaction

miliar perhari, mulai dari hari pertama ditransaksikan hingga akhir hari perdagangan di tahun 2001. Diharapkan, selain dapat dijadikan alternatif investasi baru oleh masyarakat juga dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemodal sebagai instrumen lindung nilai atau hedging instrument.

Di bidang regulasi, dilakukan penyempurnaan terhadap 4 peraturan Bapepam yang meliputi Peraturan III.A.3 tentang Komisaris dan Direksi Bursa Efek, Peraturan Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan atas Saham atau Efek Bersifat Ekuitas Lain yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, dan Peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan Peraturan No IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Tujuan penyempurnaan ketiga regulasi tersebut selain untuk meningkatkan aksesibilitas pelaku ke Pasar Modal Indonesia khususnya dalam memperoleh sumber pembiayaan baik oleh pengusaha besar maupun kecil-menengah, juga diharapkan mampu untuk memfasilitasi program privatisasi BUMN. Ketiga regulasi baru tersebut diharap mampu mendorong meningkatnya likuiditas transaksi di Pasar Modal Indonesia.

Menindaklanjuti upaya yang telah diajukan sejak tahun sebelumnya, di tahun 2001 Bapepam juga giat mensosialisasikan rancangan revisi Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), selain untuk menyikapi perubahan fundamental aktual yang melanda industri jasa keuangan dunia dan mengakomodir kebutuhan pelaku pasar, juga sebagai upaya untuk menyelaraskan materi undang-undang tersebut dengan praktek dan standar internasional.

value starting from the day it was first traded up to the end of 2001 that averaged out to Rp 6.3 billion per day. This index futures was intended not only as another alternative of investment for investors but also as a reliable hedging instrument for market participants.

With regard to regulation, Bapepam completed revising 4 rules, i.e., rule number III.A.3 concerning Commissioners and Directors of Stock Exchange, rule number IX.A.6 concerning Restriction on Shares Issued Prior to a Public Offering, and rule number IX.E.2 concerning Material Transaction and Shifting of Core Business, and Rule number IX.D.1 concerning Pre-emptive Rights. The reason behind the revision was to allow faster and easier access to Indonesian Capital Market for participants especially with regard to providing financing option for small and medium enterprises and facilitating state owned enterprises privatization program. These three rules were expected to promote liquidity of securities transaction in Indonesian Capital Market.

Resuming the efforts in the previous years, Bapepam in 2001 aggressively socialized draft amendment to the Capital Market Law which was intended to respond to fundamental shifts in global financial services sector and to accommodate the interests of the market participants as well as to synchronize points contained in the draft with international capital market practices and standards.

## Sambutan Ketua

Dapat dicatat pula bahwa Bapepam bersama lembaga pemerintah terkait lainnya seperti Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI tengah mengkaji kemungkinan dilakukannya pengintegrasian aktivitas pengawasan industri jasa keuangan ke dalam satu atap melalui pendirian Lembaga Pengawas Jasa Keuangan atau sekarang disebut dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Wacana pendirian lembaga pengawas jasa keuangan terpadu tersebut muncul seiring dengan kebutuhan akan peraturan dan kebijakan pengaturan serta pengawasan industri yang terintegrasi, harmonis, dan konsisten yang dapat diandalkan untuk mengurangi resiko sistemik antar-industri jasa keuangan yang semakin terintegrasi dan berkorelasi sedemikian rupa satu sama lainnya.

Bapepam juga mendukung penuh upaya Self Regulatory Organization (SRO) untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pasar. Upaya tersebut antara lain pemberlakuan sistem Pinjam Meminjam Efek (PME) dan pengembangan sistem Disaster Recovery Center (DRC). Upaya lain juga mencakup kesiapan KSEI dalam menerapkan sistem pencatatan sub-rekening efek dan upaya percepatan waktu penyelesaian transaksi atau settlement cycle dari T+4 (saham scripless) dan T+4/T+5 (saham non-scripless) menjadi T+3 guna mensejajarkannya dengan pasar modal negara lain serta guna memenuhi persyaratan internasional sebagaimana direkomendasikan oleh G30.

Di tahun 2001, kegiatan penyelesaian transaksi tanpa warkat melalui sistem Central Depository and Book-Entry Settlement System atau C-BEST

In addition, Bapepam and other regulatory bodies such as Directorate General of Financial Institution and the Bank of Indonesia discussed the possibility of integrating the supervision of financial services sector into a new institution called Financial Services Supervisory Institution or now known as Financial Services Authority.

The thought of creating such integrated financial services supervisory institution arose as the result of the needs to have an integrated, harmonized, and consistent regulation and policy making reliable enough to reduce the systemic risk across a continuously converged and correlated financial services industries.

Bapepam also gave a full support to Self Regulatory Organizations (SROs) on their efforts to increase the quality of market infrastructures. The efforts among other things were to implement Securities Lending and Borrowing (SLB) and to develop Disaster Recovery Center (DRC) system. Other efforts were to provide Central Securities Depository (CSD) with Securities Sub-Account Recording System and to shorten the settlement cycle from T+4 (scripless shares) and T+4/T+5 (non scripless shares) to T+3 in order meet International requirement as recommended by G30.

In year 2001, there is an impressive development in transaction settlement of scripless shares through a system called Central Depository and Book-Entry Settlement System or C-BEST as the last module (corporate actions) was put to work in August 2001. Currently, The Jakarta Stock

juga semakin menunjukkan kemajuan dengan telah terpasangnya modul terakhir (corporate actions) dalam sistem tersebut pada bulan Agustus 2001. BEJ dan BES juga tengah mengembangkan remote trading dan on-line trading system yang memungkinkan semakin cepat dan efisiennya akses pemodal untuk melakukan transaksi sehingga pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan likuiditas transaksi di bursa.

Di bidang penegakan hukum, sepanjang tahun 2001 Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif dan memerintahkan untuk dilakukannya tindakan tertentu terhadap 292 Pihak, 184 Pihak diantaranya dikenakan sanksi administratif berupa denda dan tindakan tertentu dengan total nilai uang yang harus disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 16.573.000.000,- (enam belas miliar limaratus tujuh puluh tiga juta rupiah).

Dalam periode yang sama, Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap 44 kasus di bidang pasar modal, 34 diantaranya dapat terselesaikan di tahun 2001 ini dan 2 kasus diantaranya ditingkatkan ke proses penyidikan. Dengan demikian, total kasus yang dilanjutkan proses penyidikannya ke tahun 2002 menjadi 3 kasus, satu diantaranya adalah kasus dugaan pelanggaran keterbukaan informasi di tahun 2000 yang melibatkan eks-manajemen PT Dharmala Sakti Sejahtera.

Diantara kasus pelanggaran yang cukup menonjol dan telah berhasil dituntaskan di tahun 2001 ini adalah dugaan manipulasi pasar dan insider trading atas saham Bank BCA, dugaan pelanggaran dalam transaksi saham HM Sampoerna di pasar segera, dan dugaan

Exchange (JSX) and SSX are also involved in building up remote trading and online trading system that enable to deliver faster and more efficient access by investors to carry out transactions which in turn increase liquidity.

With regard to law enforcement, during the year 2001 Bapepam has imposed administrative sanctions and ordered to take certain measures to 292 parties, 184 of them has been imposed with administrative sanctions in the form of fines and other certain measures resulting to total revenue of Rp 16,573,000,000 payable to state account.

During the same period, Bapepam has also examined 44 cases related to capital market practices, 34 of them has been completed, and 2 others were brought to investigation stage. Therefore, the total number of cases that were brought into investigation stage was 3, one of which was a case related to violation on disclosure principle occurred in the year 2000 involving former management team of PT Dharmala Sakti Sejahtera.

Among completed cases during 2001, the worth noting one were cases relating to suspected market manipulation and insider trading on shares of Bank BCA, suspected violation on transaction of PT HM Sampoerna's shares in immediate market, and suspected violation on disclosure principles involving 4 public companies or bond issuers under a business group of Sinar Mas.

## Sambutan Ketua

### Chairman Statement

pelanggaran keterbukaan informasi yang melibatkan 4 Perusahaan Publik atau Emiten obligasi yang tergabung di dalam kelompok usaha Sinar Mas Group.

Sepanjang tahun 2001, Bapepam juga terus melakukan sekaligus meningkatkan koordinasi kerja dengan SRO, Kepolisian, Kejaksaan, serta lembaga pengawas pasar modal negara lain khususnya Hong Kong dan Singapura, guna lebih meningkatkan kualitas penegakan hukum di Pasar Modal Indonesia.

Meningkatnya partisipasi masyarakat, pelaku pasar, juga pengawasan oleh lembaga-lembaga lain di luar eksekutif seperti media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan Dewan Perwakilan Rakyat di tahun 2001, semakin mendorong dan meningkatkan tekad serta komitmen Bapepam memberikan yang terbaik demi perlindungan terhadap pemodal dan masyarakat dari praktek-praktek curang dan ilegal di Pasar Modal Indonesia.

#### **Herwidayatmo**

Ketua / Chairman

Badan Pengawas Pasar Modal /  
Indonesia Capital Market Supervisory Agency

All along 2001 Bapepam kept on building and improving coordination with SROs, the National Police, and the Attorney Office as well as international capital market regulatory bodies—especially Hong Kong and Singapore—in order to do a face lift on Indonesia’s law enforcement practices.

The ever-increasing participation from public investors and market participans, the wider eyes of non-regulatory institution such as the media and NGOs, and the growing scrutiny from the House of Representative in 2001 has given wake up call for Bapepam to march forward with full determination and commitment to give its best to protect investors from illegal and unfair practices in Indonesian Capital Market.

# Perkembangan Bursa Regional & Indonesia

## Regional & Indonesian Exchanges Review

### Bursa Regional

Pada tahun 2001, kondisi bursa di kawasan regional masih menunjukkan kelesuan yang nampak dari beberapa indikator pasar seperti indeks, nilai kapitalisasi pasar, dan nilai perdagangan saham yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2000.

### Regional Exchanges

In 2001 the regional exchanges was still bearish. This condition is reflected by the declining of numerous market indicators such as index, market capitalization as well as trading value compared to those of the year 2000.

**Indikator Bursa Regional**  
Regional Exchanges Indicators

Negara	Indeks <sup>1)</sup>	Nilai Kapitalisasi Pasar <sup>2)</sup>	Nilai Perdagangan Saham <sup>3)</sup>	Jml Perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa <sup>4)</sup>	Perbandingan nilai kapitalisasi pasar terhadap PDB harga berlaku (%) <sup>5)</sup>
Country	Indices	Market Capitalization	Shares Trading Value	Number of Listed Companies	Market capitalization toward GDP current prize ratio (%)
<b>Indonesia</b>					
2000	416.321	28.643,1	14.647,8	284	62.20
2001	392.036	22.231,3	8.893,0	315	
Δ %	(5.83)	(22.39)	(39.29)	10.92	
<b>Malaysia</b>					
2000	679.64	123.746,3	51.724,2	790	478.18
2001	696.09	111.365,0	18.725,6	804	
Δ %	2.42	(10.01)	(63.80)	1.77	
<b>Singapore</b>					
2000	1,962.83	154,449.0	89,078.9	375	557.66
2001	1,623.60	107,580.1	65,904.7	386	
Δ %	(15.74)	(30.35)	(26.02)	2.93	
<b>Thailand</b>					
2000	269.19	29,727.8	20,211.7	381	27.22
2001	303.85	33,670.1	27,665.5	380	
Δ %	12.88	13.26	36.88	(0.26)	
<b>Philippine</b>					
2000	1,494.50	24,689.5	8,062.0	228	118.61
2001	1,168.08	20,449.6	2,942.5	231	
Δ %	(21.84)	(17.17)	(63.50)	1.32	
<b>Japan</b>					
2000	13,785.69	3,473,613.6	2,176,411.0	2,070	240.40
2001	10,542.62	2,452,078.2	1,544,633.0	2,137	
Δ %	(23.52)	(28.67)	(29.03)	3.23	
<b>Taiwan</b>					
2000	4,739.09	274,130.9	957,354.1	530	273.31
2001	5,551.24	235,200.4	458,471.4	587	
Δ %	17.14	(14.20)	(52.11)	10.75	
<b>Hong Kong</b>					
2000	15,095.53	582,452.5	358,524.8	780	1,052.97
2001	11,397.21	499,733.6	224,995.5	849	
Δ %	(24.50)	(14.20)	(37.24)	8.85	

<sup>1)</sup> Periode akhir tahun / year end period

<sup>2)</sup> Dalam juta US Dolar (per Nopember) / in million US Dollar (as of November)

<sup>3)</sup> Dalam juta US Dolar (Januari-Nopember) / in million US Dollar (January-November)

<sup>4)</sup> Data per Nopember 2001 / data as of November 2001

<sup>5)</sup> Data per September 2001 / data as of September 2001

Source : Bloomberg & World Federation of Exchanges (FIBV)

## Perkembangan Bursa Regional & Indonesia

Kinerja pasar modal Indonesia sepanjang tahun 2001 merefleksikan kembali keterkaitan sekaligus sensitivitas industri tersebut terhadap berbagai perkembangan di bidang ekonomi dan politik berskala nasional maupun global. Setidaknya tercatat 3 peristiwa besar yang membawa dampak signifikan terhadap pertumbuhan pasar modal Indonesia di tahun 2001.

Pertama, terpilihnya Megawati Soekarnoputri menggantikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia ke-5 melalui mekanisme Sidang Istimewa MPR yang ditindaklanjuti dengan penyusunan kabinet baru di bidang ekonomi yang dianggap market-friendly dan mendapat pujian dari banyak kalangan, sehingga langsung mendapat respon positif dari para pelaku pasar. Kedua, serangan tidak terduga berdampak ekstrem terhadap dua gedung monumental di Amerika Serikat (World Trade Center di New York dan Pentagon di Washington DC) yang membawa implikasi global terhadap keberadaan industri sekuritas dunia. Ketiga, serangan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Afghanistan yang dimulai pada awal Oktober 2001, yang membawa dampak negatif sesaat bagi sebagian besar pasar modal dunia dan menimbulkan sentimen negatif berkepanjangan terhadap kondisi pasar modal di tanah air paska tragedi WTC tersebut.

Bursa Efek Indonesia yang direpresentasikan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) masih menunjukkan perkembangan yang menengah dibanding bursa-bursa regional. Persentase penurunan indeks BEJ sebesar 5,83% atau terendah dibanding penurunan bursa regional lainnya. Nilai kapitalisasi pasar BEJ menurun sebesar 22,39% masih lebih rendah dibanding

The performance of Indonesian capital market throughout the year reflected a strong relationship and sensitivity of this industry towards numerous global or national issues of politics and economy. There were at least three (3) big events which significantly influenced the growth of Indonesian Capital market in 2001.

Firstly, through special session of People's Assembly, Megawati Soekarnoputri was elected as the fifth President of the Republic of Indonesia replacing Abdurrahman Wahid. The election brought about the establishment of a new economy cabinet which was acknowledged as market-friendly and praised by most people, which was also positively responded by market participants. Secondly, the surprising attacks on two monumental building in the United State of America (World Trade Center in New York and Pentagon in Washington DC) resulted in global implication for securities industries throughout the world. Thirdly, started in early October 2001, US and its allies began to attack Afghanistan. While the attack brought a temporarily negative impact on most capital markets in the world, it unsuspectedly brings long-term negative sentiment toward Indonesian capital market, Post WTC disaster

Indonesian capital market represented by Jakarta Stock Exchange displayed an average performance compared to other regional exchanges. The decrease in percentage of JSX's index was only 5.83%, the lowest compared to those of other decreasing regional exchanges. JSX's market capitalization decreased 22.39% which was much lower than those exchanges

penurunan di bursa Singapura dan Jepang. Nilai perdagangan saham BEJ juga mengalami penurunan sebesar 39,29% yang masih lebih rendah dari penurunan bursa Malaysia, Philipina, dan Taiwan.

Sementara itu, jumlah perusahaan yang sahamnya tercatat di BEJ mengalami pertumbuhan yang lebih besar dibandingkan bursa-bursa regional lainnya yakni sebesar 10,92%. Namun dilihat dari persentase nilai kapitalisasi pasar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tampak relatif masih rendah yaitu sebesar 62,20%. Hal ini menunjukkan bahwa peluang untuk meningkatkan mobilisasi dana di pasar modal Indonesia masih cukup besar.

Sementara itu total nilai perdagangan di Bursa Efek Surabaya (BES) sampai dengan akhir tahun 2001 mencapai Rp 2,72 triliun, atau menurun sebesar 72,74 % dibandingkan dengan tahun 2000 yang mencapai Rp 9,98 triliun. Rata-rata nilai perdagangan per hari mencapai Rp 11,1 miliar pada tahun 2001, menurun 73,18 % dibandingkan tahun 2000 yang mencapai Rp 41,4 miliar.

IHSG di BES tahun 2001 mencapai titik tertinggi pada angka 220,89 sedangkan titik terendah pada angka 207,82. Indeks akhir tahun 2001 berada pada angka 220,893 yang lebih rendah 17,47 % dibandingkan indeks penutupan tahun sebelumnya pada angka 267,638. Nilai kapitalisasi pasar yang tercatat di BES pada akhir tahun mencapai Rp 197,90 triliun atau menurun sebesar 12,35 % dibandingkan nilai kapitalisasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 225,80 triliun.

in Singapore and Japan. JSX's trading value declined 39.29% which was also lower than those of Malaysian's, Philippine's, and Taiwan's.

Meanwhile, the number of company listed in JSX, showed the highest growth among those of other regional exchanges, which is 10.92 %. Nevertheless, based on the ratio of market capitalization to Gross Domestic Products (GDP), Indonesia had a low ratio of 62.20%. This indicates a big opportunity for Indonesia to increase fund mobilization in capital market.

Meanwhile until the end of the year, the SSX trading value was Rp2.72 trillion, a decline of 72.74% compared to that of previous year's which was Rp9.985 trillion. Meanwhile, the average daily trading value decreased by 73.18% from Rp41.4 billion in 2000 down to Rp11.1 billion in 2001.

During the year, the SSX's composite index reached its highest point at 220.89 and its lowest point at 207.82. The closing index of 2001 was at 220.893 which was lower than that of the previous year's at 267.638, a decreased of 17.47%. Until the end of the year, market capitalization at SSX was Rp 197.90 trillion a decrease of 12.35% compared to that of the previous year's which was Rp 225.80 trillion.

## Perkembangan Bursa Regional & Indonesia

### Regional & Indonesian Exchanges Review

Sementara itu transaksi LQ45 Futures di BES yang sudah dimulai sejak 13 Agustus 2001 sampai dengan akhir tahun 2001 telah mentransaksikan 64,036 kontrak yang terdiri dari LQAugs01, LQSep01, LQNov01, dan LQDec01 dengan nilai transaksi sebesar Rp 525,712 milyar. Perdagangan LQ45 Futures didominasi oleh kontrak bulanan dengan rata-rata kontrak terbuka setiap akhir hari sebanyak 91 kontrak. Harga kontrak tertinggi sejak diperdagangkan adalah 90,62 (tanggal 13 Agustus 2001) dan harga kontrak terendah adalah 72,77 (tanggal 3 Oktober 2001), sedangkan Indeks LQ45 BEJ pada periode yang sama tertinggi adalah 92,87 (tanggal 7 September 2001) dan terendah 73,75 (tanggal 8 Oktober 2001).

Meanwhile, LQ45 Future trading in SSX, which was launched on August 13<sup>th</sup> 2001 up to the end of year 2001, amounted to 64.036 contractual agreements comprised of LQAugs01, LQSep01, LQNov01, and LQDec01 with the transaction value of Rp525.712 billion. LQ45 Future trading was dominated by monthly contractual agreements with average daily open contracts amounted to 91 contracts. The highest contract price since it has been initiated was 90.62 (on August 13<sup>th</sup> 2001) and the lowest contract price was 72.77 (on October 3<sup>rd</sup> 2001), whereas JSX's LQ45 Index in the same period reached its highest point at 92.87 (on September 7<sup>th</sup> 2001) and its lowest at 73.75 on October 8, 2001.

## Kilasan Pengembangan Pasar Modal

### Capital Market Developmental Review

Selama tahun 2001 Bapepam bersama-sama dengan para pelaku pasar modal lainnya secara terpadu terus berupaya mengembangkan infrastruktur pasar untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi dan mensejajarkan diri dengan kualitas infrastruktur pasar modal negara lainnya yang telah maju dan modern.

Upaya-upaya peningkatan infrastruktur pasar yang telah dilakukan selama tahun 2001 antara lain adalah:

#### **Penyempurnaan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama**

Untuk mendukung program restrukturisasi perusahaan dan pemulihan ekonomi nasional serta mendukung efektivitas pelaksanaan putusan hakim, maka Bapepam menyempurnakan peraturan IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Penyempurnaan tersebut berupa tambahan pengecualian ketentuan ini untuk transaksi yang dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan dengan BPPN dan pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu juga ditambahkan ketentuan tentang transaksi material atas aset-aset yang dikuasai BPPN yang dilakukan melalui mekanisme lelang.

#### **Penyempurnaan peraturan No. IX.A.6. tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.**

Dalam rangka mendukung privatisasi Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan pemulihan perekonomian nasional dan restrukturisasi perusahaan serta pelaksanaan Otonomi Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan

During the year 2001, Bapepam together with all capital market participants had put a lot of efforts to improve market infrastructures in order to increase safety and comfort in doing business as well as to equalize the infrastructures quality with those of more developed and modern capital markets.

Some of those efforts were, among other things:

#### **The Revision of Rule No.IX.E.2 Concerning Material Transaction and Changes of Main Business Activity**

In order to support corporate restructuring program and national economy recovery, as well as implementation of court verdict, Bapepam revised Rule No.IX.E.2 concerning Material Transaction and changes of Main Business Activity. The revision added a stipulation concerning exemption for transaction related to corporate restructuring done through Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) or due to court verdict. Furthermore, it also added a stipulation concerning material transaction on IBRA's owned assets through auction.

#### **The Revision of Rule IX.A.6 Concerning Restriction on Shares Issued Prior to Initial Public Offering**

In order to support state owned enterprise privatization, national economy recovery and corporate restructuring as well as implementation of province autonomy, while considering investor protection, Bapepam revised Rule No.IX.A.6 concerning Restrictions on Shares Issued Prior to Initial Public Offering. The revision added exemption from the rules

## Kilasan Pengembangan Pasar Modal

kepada investor, Bapepam menyempurnakan peraturan No. IX.A.6. tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum. Penyempurnaan tersebut berupa pengecualian ketentuan ini bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah. Selain itu juga ditambahkan ketentuan tentang rincian keterbukaan yang harus dilakukan oleh emiten dalam prospektus dan ketentuan sanksinya.

### **Pemberlakuan Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending and Borrowing).**

Bertepatan dengan ulang tahun Pasar Modal Indonesia ke-24 tanggal 10 Agustus 2001, KPEI mulai menerapkan sistem Pinjam Meminjam Efek (PME) yang bertujuan untuk membantu Anggota Bursa (dalam hal ini Anggota Kliring) yang membutuhkan pinjaman Efek untuk menghindari terjadinya kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Tata cara pelaksanaan transaksi PME tersebut ditetapkan sesuai dengan Keputusan Direksi KPEI Nomor Kep-003/DIR/KPEI/0701 tanggal 4 Juli 2001 tentang Peraturan KPEI Nomor II-10 tentang Jasa Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat yang telah memperoleh persetujuan Bapepam melalui surat Nomor S-1643/PM/2001 tanggal 3 Juli 2001.

### **Sistem Pencatatan Sub-Rekening Efek**

Guna lebih meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan pemodal, pada tahun 2001 KSEI juga telah selesai menyiapkan infrastruktur sistem pencatatan sub-rekening efek yang memisahkan secara tegas pencatatan aset milik pemodal dengan aset milik anggota bursa atau bank kustodian di mana mereka berinvestasi atau mempunyai rekening efek. Dengan penerapan

for Indonesian Bank Restructuring Agency, Central Government, and Province Government. Furthermore, it also added a stipulation concerning matters that must be disclosed in prospectus by issuers, and its sanctions.

### **Launching of Securities Lending and Borrowing**

Coincided with Indonesian capital market's 24<sup>th</sup> Anniversary on August 10, 2001, Clearing Guarantee Corporation (CGC) introduced a system called Securities Lending and Borrowing (SLB) aimed at facilitating members of stock exchanges (which are also clearing members) to borrow shares in order to avoid settlement failure. The mechanism of this system is stipulated under KPEI's Director Decree No. Kep-0032/DIR/KPEI/0701 dated July 4, 2001 concerning CGC rule No. II-10 concerning Scripless Shares Lending and Borrowing Services which had received approval from Bapepam with the letter No. S-1643/PM/2001 dated July 3, 2001.

### **The Introduction of Sub-Account Recording of Shares**

To further improve investor protection, CSD prepared infrastructure that allow sub-account recording of shares which separated investor assets from those of stock exchange members or custodian banks in which they invested or had an account. With the implementation of this system, all rights of investors such as to participate in a Shareholders General Meeting, to receive dividends, and other benefits from share ownership can be exercised and carried

sistem pencatatan tersebut maka segala hak pemodal seperti untuk mengikuti RUPS, menerima dividen, dan manfaat-manfaat atas Efek lainnya dapat dilaksanakan dan terselenggara secara optimal. Sampai akhir tahun 2001 telah tercatat sejumlah 45.050 sub-rekening yang telah dibuka oleh pemodal retail maupun kelembagaan melalui 185 anggota bursa dan 18 bank kustodian.

### **Kemajuan Implementasi Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading)**

Kegiatan penyelesaian transaksi tanpa warkat melalui sistem Central Depository and Book-Entry Settlement System atau C-BEST semakin menunjukkan kemajuan dengan telah terpasangnya modul terakhir (corporate actions) pada bulan Agustus 2001. Berkaitan dengan implementasi scripless trading dan penerapan secara penuh book-entry settlement system, KSEI menargetkan pada Juni 2002 seluruh saham tercatat telah dapat dimasukkan ke dalam sistem C-BEST.

### **Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di BES**

Dari sisi pengembangan instrumen pasar, mulai tanggal 13 Agustus 2001 PT Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 2001 ini telah meluncurkan instrumen investasi baru berupa LQ-45 Futures Index atau Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE), yang dapat dijadikan alternatif investasi masyarakat dan juga diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh pemodal sebagai instrumen lindung nilai atau hedging instrument. Peraturan guna mendukung legalitas transaksi tersebut serta guna melindungi kepentingan para pihak yang mentransaksikan instrumen baru tersebut tertuang dalam

out completely. As of the end of 2001, there were 45,050 sub-accounts opened by both institutional and retail investors through 185 stock exchange members and 18 custodian banks.

### **The Improvement on the Implementation of Scripless Trading**

Transaction settlement activities of scripless shares through a system called Central Depository and Book-Entry Settlement System (C-BEST) showed improvement with the installation of its last module (corporate actions) in August 2001. With regard to the implementation of scripless trading and full application of book-entry settlement system, CSD had set a target that by June 2002 all registered shares could all be processed through C-BEST system.

### **The Introduction of Futures Index Trading (FIT) in Surabaya Stock Exchange**

From the infrastructure development side, the Surabaya Stock Exchange (SSX) launched a new type of investment instrument called LQ-45 Futures Index on August 13, 2001, which provided another investment alternative for public and was meant to be employed at the greatest extent as a hedging instrument. Rules that support the legality of this securities transaction and protect the interests of parties involved in its trading activities were incorporated in rules of FIT released by SSX after receiving approval from Bapepam through

# Kilasan Pengembangan Pasar Modal

## Capital Market Developmental Review

Peraturan Perdagangan KBIE yang dikeluarkan oleh BES dan telah mendapat persetujuan dari Bapepam melalui surat Nomor S-850/PM/2001 tertanggal 25 April 2001.

### **Pengembangan Remote Trading dan On-Line Trading System**

BEJ dan BES juga tengah mengembangkan remote trading dan on-line trading system yang memungkinkan semakin cepat dan efisiennya akses pemodal untuk melakukan transaksi sehingga pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan likuiditas transaksi di bursa.

letter number S-850/PM/2001 dated April 25, 2001.

### **The Development of Remote Trading and Online Trading System**

JSX and SSX were and are still in the process of developing remote trading and online trading system which enable to deliver faster and more efficient access by investors to carry out transactions which in turn increase liquidity.

# Perundang-undangan & Bantuan Hukum

## Regulatory & Legal Council

### Strategi

- Menyempurnakan dan melengkapi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- Mengharmonisasikan standar praktik Pasar Modal Indonesia dengan standar dan praktik internasional

### Yang Kami Lakukan

- Menelaah, menyusun, dan memberikan pendapat hukum atas peraturan di bidang pasar modal
- Memberikan saran dan pendapat hukum atas permasalahan di bidang pasar modal
- Memberikan pertimbangan pengenaan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pasar modal
- Memberikan pertimbangan, saran, dan pendapat hukum atas keberatan yang berkaitan dengan pengenaan sanksi
- Memberikan bantuan hukum atas masalah yang dihadapi Bapepam
- Melaksanakan litigasi dalam hal Bapepam beracara dipengadilan atau menjadi saksi
- Melakukan pengawasan kepada Konsultan Hukum dan Notaris

### Our Strategies

- Perfecting and completing legal and regulatory framework in the capital market
- Harmonizing standards of practices in Indonesian Capital Market with those established internationally

### What We Do

- Analyzing, drafting, and providing legal opinion on capital market rules
- Offering suggestion and legal opinion on issues related to capital market
- Furnishing judgments on sanction imposition to capital market participants
- Offering judgments, suggestion, and legal opinion on objections related to sanction imposition
- Providing legal assistance on any issues confronting Bapepam
- Carrying out litigation in the case Bapepam appears before a court or stands as a witness
- Carrying out monitoring on Legal Consultants and Notaries

## Perundang-undangan & Bantuan Hukum

### Yang Kami Capai

- Menghasilkan rancangan perubahan UUPM
- Menyempurnakan 4 (empat) peraturan
- Mewakili Bapepam dalam proses peradilan sebanyak 2 (dua) perkara
- Memberikan sanksi kepada 28 Perusahaan Efek
- Memberikan sanksi kepada 2 Wakil Perusahaan Efek
- Memberikan sanksi kepada 8 Biro Administrasi Efek
- Memberikan sanksi kepada 1 Bank Kustodian
- Memberikan sanksi kepada 130 Emiten
- Menjadi saksi ahli pasar modal di Kepolisian dalam 5 (lima) kasus
- Menjadi saksi ahli pasar modal di Kejaksaan dalam 3 (tiga) kasus

### Rencana Ke Depan

Menyelesaikan amandemen Undang-undang Pasar Modal

### What We Have Accomplished

- Produced draft amendment to the Capital Market Law
- Revised 4 rules
- Represented Bapepam in courts for 2 separated cases
- Imposed sanctions on 28 securities companies
- Imposed sanctions on 2 securities companies representatives
- Imposed sanctions on 8 securities administration agencies
- Imposed sanctions on 1 custodian bank
- Imposed sanctions on 130 issuers
- Appeared in courts as an capital market expert witness for the National Police in 5 cases
- Appeared in courts as an capital market expert witness for the Attorney Office in 3 cases

### Outlook

Finishing the Capital Market Law Amendment

Selama tahun 2001 Bapepam telah melakukan revisi terhadap Peraturan Bapepam Nomor III.A.3 tentang Komisaris dan Direksi Bursa Efek. Revisi tersebut pada intinya bertujuan untuk meningkatkan integritas dan kualitas manajemen bursa guna lebih meningkatkan kesiapan sekaligus kemampuan bursa efek nasional dalam menghadapi era persaingan bursa global ke depan.

Peraturan baru ini juga dimaksudkan agar manajemen bursa mampu menjadi penggerak sekaligus dinamisator penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance yang harus dianut dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh Emiten dan pelaku pasar lainnya di Pasar Modal Indonesia.

Selanjutnya guna mendukung program privatisasi BUMN dan mendorong pemanfaatan pasar modal sebagai alternatif sumber pembiayaan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Bapepam juga melakukan revisi terhadap 3 (tiga) Peraturan Bapepam masing-masing Nomor IX.A.6 tentang Pembatasan atas Saham atau Efek Bersifat Ekuitas Lain yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Penyempurnaan kedua peraturan yang pertama tersebut diharapkan selain mampu meningkatkan aksesabilitas pelaku ke Pasar Modal Indonesia khususnya dalam memperoleh sumber pembiayaan baik oleh pengusaha besar maupun kecil-menengah, juga mampu memfasilitasi program privatisasi BUMN serta mendorong meningkatnya likuiditas Pasar Modal Indonesia.

During the year 2001 Bapepam has revised rule number III.A.3 concerning Commissioners and Directors of Stock Exchange. The revision was geared toward improving integrity and quality of the stock exchange management in light of improving the preparation and capability of the domestic stock exchange confronting the incoming global competition.

The revised rule was also intended to push stock exchange management to be generator and activator in implementing management practices in accordance with good corporate governance principles that must be adopted and put in place totally by issuers and other capital market participants in Indonesia.

Further, in a move to support the state owned enterprises privatization program and to encourage the use of capital market as an alternative of financing for municipalities with respect to the implementation of autonomous decentralized region concept, Bapepam had also completed revising 3 rules, i.e. Rule number IX.A.6 concerning Restrictions on Shares Issued Prior to an Initial Public Offering, Rule number IX.E.2 concerning Material Transaction and Changes of Main Business Activity, and Rule number IX.D.1 concerning Pre-emptive Rights.

The revision of the first two rules was expected not only to provide easier access to all capital market participants and other parties, especially small and medium enterprises wishing to use capital market as the source of financing but also to support the state owned enterprises privatization program as well as to bring liquidity back to Indonesian Capital Market.

Sementara itu, penyempurnaan peraturan IX.D.1 mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dimaksudkan untuk memberikan alternatif bagi investor dalam menentukan keputusan investasinya. Alternatif tersebut diwujudkan dengan memberikan kemungkinan kepada perusahaan untuk menerbitkan waran kepada investor sampai dengan 30 % dari modal disetor.

Kegiatan Bapepam di bidang regulasi lainnya dalam tahun 2001 adalah secara intensif melanjutkan pembahasan perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan melakukan sosialisasi atas rencana revisi tersebut. Kegiatan pembahasan dan sosialisasi dimaksudkan sebagai upaya Bapepam untuk menyelaraskan materi undang-undang tersebut dengan praktik dan standar internasional, menyikapi perubahan fundamental aktual yang terjadi dalam industri jasa keuangan dunia, serta mengakomodir kebutuhan pelaku pasar.

Materi dalam UUPM yang akan mengalami perubahan antara lain berkaitan dengan peningkatan independensi lembaga pengawas, perubahan struktur kepemilikan lembaga bursa efek menyongsong era demutualisasi, dibukanya kemungkinan penerbitan saham tanpa nilai nominal, kepemilikan atas saham secara nominee, penerangan kewenangan Bapepam terkait dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance principles), serta materi lain yang terkait dengan upaya penciptaan kepastian hukum yang bermuara kepada perlindungan terhadap pemodal dan masyarakat.

Selain itu, Bapepam bersama Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan Departemen Keuangan RI dan Bank Indonesia melakukan kajian kemungkinan pengintegrasian aktivitas pengawasan industri

On the other hand, the revision of Rule number IX.D.1 concerning Pre-emptive Rights was intended to provide a wider range of alternatives for investors in making their investment decisions. Those alternatives were in the form of approval for corporations to issue warrant up to 30% of paid in capital to investors.

Another move in the realm of regulation during year 2001 was the continuous effort to discuss draft amendment of the Capital Market Law followed by socialization of the draft. The discussion and the socialization program was meant as a strategic step to synchronize points contained in the draft with international capital market practices and standards, respond to fundamental shifts facing global financial services industry, and to accommodate the interests of the market participants.

Some of the points incorporated in the draft amendment covered, among other things, improvement of independency of the supervising institution, the structural change with regard to stock exchange ownership in light of demutualization era, the issuance of shares without par value, nominee ownership of shares, a more weight on Bapepam's authority with regard to implementation of good corporate governance principles, and other points regarding creating legal certainty aim toward improving the quality of public and investor protection.

Apart from that, Bapepam, along with Directorate General of Financial Institution - Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Bank of Indonesia, started to discuss the possibility of integrating the supervision of financial services industry under one roof. The thought of creating such integrated financial

sektor jasa keuangan ke dalam satu atap. Wacana pendirian lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpadu muncul seiring dengan kebutuhan akan peraturan dan kebijakan pengawasan industri yang terintegrasi, harmonis, dan konsisten serta dapat diandalkan. Hal tersebut untuk mengurangi resiko sistemik antar industri jasa keuangan yang semakin terintegrasi dan berkorelasi satu sama lainnya. Hasil kajian mengarah pada kesimpulan perlunya pembentukan lembaga pengawas terpadu.

Di samping kegiatan yang berkaitan dengan regulasi, dalam tahun 2001 Bapepam juga menghadapi 2 (dua) kasus yang menempatkan Bapepam sebagai tergugat. Kasus pertama berkaitan dengan gugatan investor bernama Herwanto terhadap antara lain Komisaris dan direktur PT Fiskar Agung sebagai tergugat I s/d VI, PT Bursa Efek Jakarta sebagai tergugat VII, dan Bapepam sebagai tergugat VIII yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PNJS) dengan Perkara Nomor 55/PDT.G/2001/PN.JAK.SEL. Kasus ini telah diputus oleh Majelis Hakim PNJS dimana gugatan Herwanto ditolak seluruhnya. Namun demikian, perkara tersebut masih dalam proses banding.

Kasus kedua berupa gugatan dari Emiten PT Indocopper Investama Corporation Tbk kepada Bapepam atas ketidakpuasannya terhadap sanksi yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan karena melanggar Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Perkara Nomor:W7.PTUN.JKT.PRK.99-675-2001. Dalam tuntutanannya PT Indocopper Investama meminta Pengadilan untuk menyatakan surat nomor: 21/PM/S.2/2001 tentang Sanksi Atas Pelanggaran Benturan Transaksi Tertentu batal demi hukum dan memerintahkan Bapepam untuk melakukan pencabutan surat tersebut. Sampai saat ini kasus tersebut belum diputus Pengadilan.

services supervisory institution arose as the result of the needs to have an integrated, harmonized, and consistent regulation and policy making reliable enough to reduce the systemic risk across a continuously integrated and correlated financial services industries. The result of the discussion led to a notion of bringing such integrated supervisory institution into existence.

Other than activities related to regulation, Bapepam also had 2 cases that put it as a defendant. The first case was related to a lawsuit filed by an individual named Herwanto against commissioners and directors of PT Fiskaragung as defendant number 1-6, JSX as defendant number 7, and Bapepam as defendant number 8, as recorded in the South Jakarta District Court with the case number 55/PDT.G/2001/PN.JAK.SEL. The Judge Panel of the district court decided to overrule the lawsuit. Yet, the case is still in the process of appeal.

The second case was related to a lawsuit filed by an issuer named PT Indocopper Investama Corporation Tbk against Bapepam regarding the issuer's objection on sanction imposition relating to violation of Bapepam's rule number IX.E.1 concerning Conflict of Interests on Certain Transaction, as recorded in the Jakarta's State Administrative Court (PTUN) with case number W7.PTUN.JKT.PRK.99-675-2001. In the lawsuit, PT Indocopper Investama Corporation Tbk asked the court to revoke letter number S-21/PM.2/2001 concerning Sanction on Violation of Conflict of Interest on Certain Transaction and order Bapepam to withdraw the letter. Up until now the case still awaits the court decision.

### Strategi

- Mendorong Pasar Modal Indonesia sebagai penggerak ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing global dengan mengupayakan peningkatan aspek penegakan hukum
- Meningkatkan kualitas pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya

### Yang Kami Lakukan

- Melakukan kegiatan pemeriksaan dan penyidikan yang didasarkan pada laporan maupun pengaduan yang datang dari masyarakat pemodal, bursa efek, pemberitaan-pemberitaan di media massa, serta hasil temuan Bapepam berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal
- Mengumumkan hasil pemeriksaan
- Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal

### Yang Kami Capai

- Melakukan pemeriksaan terhadap 44 kasus dugaan pelanggaran di bidang pasar modal
- Menyelesaikan 33 kasus atau 75% dari total kasus yang diperiksa
- Meningkatkan 2 kasus ke tingkat penyidikan.

### Rencana Ke Depan

- Meningkatkan sumberdaya manusia sebagai aset utama melalui berbagai pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri
- Koordinasi dengan instansi penting lain seperti Polri, Kejaksaan, Bank Indonesia, BPPN, dan SRO

### Our Strategies

- Encouraging Indonesian Capital Market to become an activator for a dynamic and globally competitive national economy by improving law enforcement in the capital market
- Improving the quality of inspection and investigation to every related person in the event of violation of capital market laws and its implementing regulations

### What We do

- Conducting inspection and investigation based on reports or claims coming from investors, stock exchanges, mass media news and result of Bapepam supervision on alleged violation of capital market law.
- Announcing the investigation results
- Taking proper actions in order to prevent public loss as a result of violation in capital market

### What We Have Accomplished

- Investigated 44 cases of alleged violations on capital market law
- Accomplished 33 cases or 75% of total investigated cases
- Extended 2 cases from investigation level to criminal investigation level

### Outlook

- Strengthening human resources capability as a prominent asset through various education and training domestically and internationally
- Maintaining and increasing coordination with other institutions such as the National Police, General Attorney, Bank Indonesia, IBRA, and SROs

Mengingat pentingnya peran penegakan hukum dalam pengembangan Pasar Modal Indonesia, salah satu strategi pengembangan pelaku pasar modal yang tercantum dalam cetak biru pasar modal tahun 2000-2004 adalah peningkatan penegakan hukum.

Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum, Bapepam senantiasa bersikap proaktif terhadap laporan maupun pengaduan baik yang datang dari masyarakat pemodal, bursa efek, pemberitaan-pemberitaan di media masa, serta hasil temuan Bapepam berkaitan dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sebagai hasil dari kegiatan pemeriksaan, Bapepam berwenang mengenakan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau meningkatkannya ke tahap penyidikan.

Bentuk-bentuk sanksi sebagaimana diatur dalam UUPM dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dan pembatalan pendaftaran.

Selama tahun 2001, Bapepam melakukan pemeriksaan terhadap 34 kasus ditambah dengan 10 kasus yang belum terselesaikan di tahun 2000 sehingga total kasus yang diperiksa selama tahun 2001 adalah 44. Sampai akhir 2001 Bapepam telah berhasil menyelesaikan 33 kasus atau 75% dari total kasus yang diperiksa selama tahun 2001.

Kasus yang cukup menarik perhatian masyarakat selama tahun 2001 antara lain adalah kasus pemalsuan saham PT Tjiwi Kimia Tbk. Kasus ini berawal dari datangnya laporan dari PT Tjiwi

Considering the importance of law enforcement in developing the Indonesian Capital Market, this measure has become one of development strategies pointed out in Capital Market Blueprint 2000-2004.

In exercising law enforcement, Bapepam has always been proactively responsive towards either reports or claims from investors, stock exchanges, mass media news, and result of Bapepam supervision on alleged violations of capital market law. Following up the investigation results, Bapepam has the power to impose sanctions to parties that are proven to have violated capital market law and regulations or to extend the cases from investigation level to criminal investigation level.

The types of sanctions as regulated by capital market laws may be in the forms of written admonitions, fines, restrictions on business activity, suspensions of business activity, revocations of business licenses, cancellations of approvals, and cancellations of registrations.

During year 2001, Bapepam has been investigating 34 cases plus 10 unfinished cases of last year, which makes the total of 44 cases. Until the end of 2001 Bapepam has successfully accomplished 33 cases or 75% of total cases in year 2001.

One of worth noting cases during 2001 was the counterfeiting of PT Tjiwi Kimia Tbk.'s shares. This case arose from the report of PT Tjiwi Kimia Tbk. to JSX copy carboned to Bapepam, claiming that there has been a counterfeiting on PT Tjiwi Kimia Tbk's shares registered by PT Purinusa Eka Persada with the amount of

## Penegakan Hukum

Kimia Tbk yang disampaikan kepada BEJ dengan tembusan ke Bapepam, yang melaporkan bahwa telah terjadi pemalsuan saham PT Tjiwi Kimia Tbk atas nama PT Purinusa Eka Persada sebanyak 13.517.010 lembar saham. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pemalsuan tersebut diduga dilakukan oleh beberapa karyawan PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek yang dibantu oleh pihak lain. Dugaan pemalsuan saham ini telah diserahkan kepada pihak kepolisian sedangkan Bapepam telah menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada para perusahaan efek yang telah lalai dalam melakukan transaksi saham PT Tjiwi Kimia Tbk.

Kasus lainnya adalah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dilakukan oleh pihak yang menawarkan kerjasama untuk mendapatkan keuntungan besar di Bursa Saham Jakarta yang dimuat di Harian Pos Kota tanggal 8 Mei 2001. Yang bersangkutan terbukti melanggar Pasal 32 ayat (1) UUPM dan dikenakan peringatan agar tidak melakukan lagi kegiatannya serta diminta untuk mengembalikan seluruh dana yang telah diperoleh dari nasabah, sedangkan untuk Perusahaan Efek yang terlibat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Dugaan manipulasi pasar dan insider trading terhadap perdagangan saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) merupakan kasus yang paling mendapat sorotan sepanjang tahun 2001 di tengah gencarnya kontroversi program divestasi saham Pemerintah pada bank swasta nasional terbesar di Indonesia tersebut. Tidak hanya pengamat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI juga menaruh perhatian besar dan mengikuti secara cermat perkembangan hasil pemeriksaan

13,517,010 shares. Based on the investigation, it was suspected that the counterfeiting was done by some employees of PT Sinartama Gunita that acted as Securities Administration Agency, with the help of some other parties. This case has been delivered to the Police and Bapepam has imposed administrative sanction in the form of written admonition to Securities companies that have been negligent in executing PT Tjiwi Kimia Tbk. shares transaction.

Another worth noting case was the violation of capital market law and regulations by a party that offered a partnership to gain a windfall profit in JSX. The case was reported in Pos Kota Daily on May 8, 2001. The suspects were proven to have violated Capital Market Laws Article 32 (1) and imposed with written admonitions not to continue the activity and required to return the entire fund collected from the clients. Meanwhile, Securities Companies involved in the activity were also imposed with written admonitions.

Case that mostly drew public attention in 2001 was the suspicion of market manipulation and insider trading of PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) shares since it occurred in the middle of controversial of government shares divestment program in that bank. Capital Market observers, as well as Indonesian House Representative members took a great concern in this case and followed carefully every progress of investigation on that case. After approximately 4-month of investigation, the investigation team in early October 2001 finally concluded that the significant price movement of BBCA shares in JSX during transaction period

Bapepam untuk menyebarluaskan setiap perkembangan dari hasil pemeriksaan atas kasus tersebut.

Setelah melakukan berbagai kegiatan investigasi selama kurang lebih 4 bulan, pada awal Oktober 2001 Tim Pemeriksa akhirnya menyimpulkan bahwa pergerakan dan perubahan harga saham BBCA di Bursa Efek Jakarta periode transaksi Mei sampai dengan Juni 2001 yang cukup signifikan ternyata lebih disebabkan oleh reaksi pasar dan perilaku pemodal yang menyikapi rencana divestasi saham pemerintah pada perusahaan publik tersebut secara cukup emosional. Dengan kata lain, belum cukup bagi Tim Pemeriksa untuk secara yuridis menyimpulkan telah terjadi manipulasi pasar dan insider trading pada kasus tersebut.

Di penghujung tahun 2001, terjadi kasus yang cukup menarik perhatian yaitu perdagangan saham PT HM Sampoerna Tbk di pasar segera yang melibatkan 87 perusahaan efek.

Kasus ini bermula dari adanya corporate action berupa stock split. Akibat dari kegiatan tersebut maka Bursa Efek Jakarta telah mengumumkan bahwa harga saham HMSP di pasar reguler pada tanggal 24 September 2001 sudah menggunakan nilai nominal baru yaitu Rp.100,- sedangkan harga saham HMSP di pasar segera masih menggunakan nilai nominal lama yaitu Rp.500,-. Akibat adanya kesalahan persepsi dari para perusahaan efek maka telah terjadi transaksi saham HMSP dengan harga yang tidak sesuai seperti yang telah diumumkan sebelumnya sehingga berakibat dibatalkannya transaksi tersebut oleh Bursa Efek Jakarta.

of May to June 2001, was merely caused by investors emotional reaction over the government plan on BBCA shares divestment. In other words, the investigation team was still lack of evidences to legally conclude that there have been market manipulation and insider trading in that case.

At the end of 2001, there was another spectacular case, i.e. the trading of PT HM Sampoerna Tbk's shares in immediate market which involved 87 securities companies.

This case caused by stock split conducted by the company. As the consequences of the action, JSX announced that since September 24, 2001 the new nominal value of Rp. 100,00 applies to the regular market while in immediate market the shares were still traded at the old nominal value of Rp. 500,00. Because of the misperception of the Securities companies, there have been share transactions with improper prices, which resulted in cancellation of those activities by JSX.

Based on the investigation, Bapepam imposed administrative sanction, i.e. temporary suspension of business activity of Securities companies and written admonitions to 87 Securities companies that involved in HMSP share transaction in immediate market on September 24, 2001. Considering the number and institution status of the majority of those parties involved in the case, for the first time Bapepam imposed sanctions periodically to ensure stock exchange transaction continuity.

## Penegakan Hukum

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapepam telah mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin usaha perantara pedagang efek dan peringatan tertulis kepada 87 (delapan puluh tujuh) perusahaan efek yang melakukan transaksi saham HMSP di pasar segera pada tanggal 24 September 2001. Mengingat banyaknya Pihak yang terkena sanksi dan menimbang pula status kelembagaan dari mayoritas mereka yang terkena sanksi, maka untuk pertama kalinya penerapan sanksi oleh Bapepam dilakukan secara berkala yang semata dilakukan demi kepentingan kontinuitas transaksi di bursa.

Kasus yang ditingkatkan ke tahap penyidikan pada tahun 2001 sebanyak 2 kasus, salah satunya yaitu penyidikan terhadap PT Bank Unibank Tbk. Kasus ini bermula dari adanya peralihan pemegang saham PT Bank Unibank Tbk dari keluarga Sukanto Tanoto ke 4 (empat) perusahaan dan kemudian dialihkan kembali ke 16 (enam belas) perusahaan yang berdomisili di luar negeri. Disamping itu terdapat dugaan tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh mantan direksi PT Bank Unibank Tbk berkaitan dengan penyajian Wesel Ekspor Berjangka yang macet dalam laporan keuangan.

Dengan ditingkatkannya 2 (dua) kasus penyidikan di tahun 2001, yaitu kasus PT Bank Unibank Tbk. dan kasus manipulasi pasar terhadap perdagangan saham PT Asiaplast Industries Tbk (APLI), maka saat ini Bapepam sedang melakukan proses penyidikan terhadap 4 (empat) kasus, sedangkan kasus penyidikan yang terselesaikan adalah Kasus Mendes Prior Europe/PT Sindar Tekala Sentosa dan kasus PT Fiskaragung Perkasa.

In year 2001, Bapepam has extended the status of two cases from investigation level to criminal investigation level . One of them was the PT Bank Unibank Tbk. case. This case raised when there was a takeover of the company shares ownership from Sukanto Tanoto family by four companies, which then being taken over again by 16 companies abroad. Beside that, the former director of the company was suspected to be involved in the misrepresentation of non performing notes in the company's financial statement.

As cases of PT Bank Unibank Tbk and market manipulation on PT Asiaplast Industries Tbk (APLI) shares trading have been extended to criminal investigation level, currently Bapepam is investigating 4 cases. Criminal investigation cases that have been accomplished this year were Mendes Prior Europe/PT Sindar Tekala Sentosa and PT Fiskaragung Perkasa cases.

The tendency of capital market laws violation seems to increase, qualitatively and quantitatively. To cope with this situation, Bapepam has continuously improved its ability to enforce laws in capital market. One effort that has been realized in year 2001 was inauguration of 20 investigator officers to strengthen Bapepam's investigators team.

Kecenderungan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal tampak mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini membuat Bapepam secara berkesinambungan selalu berupaya meningkatkan kemampuannya dalam penegakan hukum di bidang pasar modal. Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2001 adalah dengan dilantiknya 20 (dua puluh) orang pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna memperkuat jajaran tim pemeriksa.

Pada masa mendatang Bapepam akan terus melakukan berbagai peningkatan di bidang pemeriksaan dan penyidikan, kemampuan sumberdaya manusia sebagai aset utama terus ditingkatkan melalui berbagai pendidikan dan latihan baik di dalam maupun di luar negeri. Koordinasi dengan instansi-instansi penting lain seperti Polri, Kejaksaan, Bank Indonesia, BPPN, BEJ dan SRO lainnya yang sudah terlaksana di tahun 2001 akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan.

Dalam rancangan revisi Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Bapepam juga menambah kewenangan dibidang pemeriksaan dan penyidikan yaitu dengan kewenangan melakukan penangkapan dan penahanan serta pencekalan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal. Bidang kerjasama pemeriksaan dan penyidikan internasional akan terus meningkatkan kerjasamanya dengan otoritas pasar modal negara lain.

In the future, Bapepam is committed to make improvement in inspection and investigation activities. Human resources capability as the prominent asset in law enforcement will be improved continuously through training and education either in Indonesia or abroad. Bapepam has maintained good coordination with other institutions such as the National Police, the General Attorney, Bank Indonesia, Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), JSX and other SROs in 2001, and will continue such a good coordination in the future.

In the Capital Market Law amendment, Bapepam also plan to extend its power in law enforcement, i.e. the power to arrest and ban any party which is suspected of violating capital market law. Beside that, Bapepam international affairs division is committed to strengthen Bapepam's relationship with other capital market regulators in other countries.

## Hubungan Internasional

Salah satu sasaran pengembangan Pasar Modal Indonesia berdasarkan cetak biru Pasar Modal Indonesia adalah terciptanya landasan bagi pasar modal yang likuid dan efisien. Untuk itu diperlukan landasan yang meliputi kebijakan fiskal dan peraturan yang mendukung good corporate governance, standar keterbukaan, dan desain pasar yang memadai serta pelayanan yang baik. Kondisi tersebut perlu diciptakan agar pasar modal Indonesia dapat sejajar dengan pasar modal dunia lainnya.

Salah satu strategi yang diterapkan adalah dengan melakukan harmonisasi kelembagaan dan kerja sama dengan lembaga-lembaga maupun organisasi-organisasi internasional dalam rangka mengantisipasi era perdagangan bebas. Sebagai anggota ASEAN dan WTO, Indonesia dalam hal ini Bapepam, bertanggung jawab untuk mengimplementasikan beberapa komitmen yang disepakati dalam Coordinating Committee on Services (CCS)-ASEAN dan General Agreement on Trade in Services (GATS)-WTO.

Di samping itu, Bapepam sebagai anggota International Organization on Securities Commission (IOSCO) wajib mematuhi resolusi-resolusi yang telah disepakati, serta melaksanakan konsensus bilateral berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU) yang telah disepakati antara lain dengan Amerika Serikat, Hong Kong, Malaysia, dan Australia.

Pada tahun 2001, Bapepam selaku salah satu anggota organisasi internasional badan pengawas pasar modal (IOSCO) secara aktif telah mengikuti berbagai program yang disponsori oleh IOSCO yaitu IOSCO APRC Meeting 2001 di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Maret 2001, Emerging Market Programme di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan

According to Indonesian Capital Market Blueprint one of Indonesian capital Market development targets is creating liquid and efficient foundation for capital market. Foundations needed are fiscal policy and regulations supporting good corporate governance, sufficient disclosure standard and market design, as well as good service. Such conditions need to exist so that Indonesian capital market will be able to stand together with other capital markets.

One of the strategies applied is by creating institution harmonization and good partnership with other institutions and international organizations to challenge the globalization. As a member of ASEAN and WTO, Indonesia in this case Bapepam, is responsible to implement commitments agreed in Coordinating Committee on Services (CCS)-ASEAN and General Agreement on Trade in Services (GATS)-WTO.

Beside that, Bapepam as a member of International Organization on Securities Commission (IOSCO) has to comply with resolutions that have been agreed. It also needs to exercise the bilateral consensus based on Memorandum of Understanding (MoU) with other regulators, such as US SEC, SFC of Hong Kong, SC of Malaysia and ASIC Australia.

In year 2001, Bapepam as a member of IOSCO has been actively involved in various programs sponsored by IOSCO, such as IOSCO APRC Meeting 2001 in Kuala Lumpur, Malaysia in March 2001, Emerging Market Programme in Kuala Lumpur, Malaysia in April 2001, Price Manipulation Seminar in Beijing, China in April 2001, the 26<sup>th</sup> Annual Conference of IOSCO in Stockholm, Swedia in June 2001, and IOSCO EMC

April 2001, Price Manipulation Seminar di Beijing, China pada bulan April 2001, the 26<sup>th</sup> Annual Conference of IOSCO di Stockholm, Swedia pada bulan Juni 2001, dan IOSCO EMC Meeting 2001 di Lahore, Pakistan pada bulan Nopember 2001. Selain itu pula Bapepam telah memenuhi permintaan IOSCO untuk ikut dalam Self Assessment Survey sebagai salah satu upaya sinkronisasi peraturan-peraturan Pasar Modal Indonesia dengan negara anggota IOSCO lainnya.

Kegiatan lainnya adalah mempersiapkan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Securities Exchange Commission Srilanka. Pada tahun 2001 Bapepam juga aktif bekerja sama dengan otoritas pasar modal Hongkong (SFC-Hongkong) dalam pemberian informasi terhadap identitas pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap peraturan pasar modal Hongkong.

Salah satu bentuk partisipasi aktif Bapepam dalam fora internasional adalah penyelenggaraan Regional Training Program: Investigation, Enforcement and Prosecution. Seminar yang diikuti oleh tidak kurang dari 12 negara asia pasifik ini diselenggarakan bekerja sama dengan APEC Financial Regulators Training Initiative.

Di masa yang akan datang, kegiatan yang bersifat koordinasi dan saling tukar menukar informasi akan terus ditingkatkan lagi, baik dengan cara berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di tingkat multilateral maupun menjalin kerjasama di tingkat bilateral melalui penandatanganan MoU dengan negara-negara lain.

Meeting 2001 in Lahore, Pakistan in November 2001. Furthermore, Bapepam has also fulfilled IOSCO request to participate in the Self-Assessment Survey as one way of accommodating Indonesian Capital Market regulations with those of other IOSCO members.

Bapepam at moment is still preparing MoU with Securities Exchange Commission of Sri Lanka. Bapepam in year 2001 has also worked together with SFC Hong Kong in exchanging information of some parties identities that were suspected to violate Hong Kong capital market laws.

One proof of the active participation of Bapepam in international activities was by performing the Regional Training Program: Investigation, Enforcement and Prosecution. Seminar which has been participated by not less than 12 Asia Pacific countries was held in coordination with the APEC Financial Regulators Training Initiative.

In the future, Bapepam is committed to improve activities of information exchange and coordination with other countries, by actively participating in multilateral and bilateral activities, such as more MoU with other international institutions and other various programs.

## Penawaran Umum

### Strategi

- Mendorong penerapan good governance secara menyeluruh oleh pelaku pasar modal
- Memberikan fasilitas yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi

### Yang Kami Lakukan

- Penelaahan pernyataan pendaftaran penawaran umum emiten dan Perusahaan Publik
- Penelaahan pernyataan penawaran tender emiten dan perusahaan publik
- Pembinaan dan pengawasan keterbukaan informasi emiten dan perusahaan publik

### Yang Kami Capai

- Memberikan pernyataan efektif atas 32 penawaran umum saham perdana
- Memberikan pernyataan efektif atas 13 penawaran umum dengan HMETD
- Memberikan pernyataan efektif atas 6 penawaran umum obligasi

### Rencana Ke Depan

- Menyiapkan landasan bagi pemantauan / pengevaluasian atas kepatuhan emiten / perusahaan publik terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
- Mendorong perusahaan kecil dan menengah untuk masuk ke pasar modal.

### Our Strategies

- Encouraging capital market participants to apply good corporate governance practices thoroughly
- Providing facilities that support the economic recovery acceleration

### What We Do

- Analyzing registration statement for public offering submitted by Issuers and Public Company
- Analyzing registration statement for tender offer submitted by Issuers and Public Company
- Providing guidance and supervision with regard Issuers and Public Company Information Disclosure

### What We Have Accomplished

- Granted declaration of effectiveness for 32 initial public offering
- Granted declaration of effectiveness for 13 public offering with pre-emptive rights
- Granted declaration of effectiveness for 6 bond offering.

### Outlook

- Preparing a groundwork for monitoring/ evaluating of Public Company adherence to Good Corporate Governance Principles
- Encouraging small and medium enterprises to participate in the capital market

### Penawaran umum saham

Selama tahun 2001, Bapepam telah memberikan pernyataan efektif atas 31 Penawaran Umum Saham Perdana, 13 Penawaran Umum Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, 6 Penawaran Umum Obligasi, dan menyetujui 8 pembelian saham kembali. Bapepam juga mengeluarkan pernyataan efektif atas 1 pernyataan pendaftaran sebagai perusahaan publik.

Secara keseluruhan total nilai emisi pada penawaran umum saham tahun 2001 adalah sebesar Rp.5.275.708.831.800, sedangkan Penawaran Umum Obligasi adalah sebesar Rp 2,875 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun 2000, jumlah emiten yang melakukan penawaran umum perdana mengalami kenaikan walaupun secara keseluruhan nilai total emisi saham maupun obligasi menurun dibandingkan tahun 2000 yang berjumlah masing-masing Rp.19,37 triliun dan Rp. 5,6 triliun.

Salah satu fenomena yang mewarnai perkembangan Pasar Modal Indonesia di tahun 2001 ini adalah meningkatnya jumlah perusahaan kecil dan menengah yang memasuki pasar modal Indonesia. Jika pada tahun 2000 terdapat 6 (enam) perusahaan kecil dan menengah yang melakukan penawaran umum perdana, maka pada tahun 2001 terdapat 16 perusahaan yang melakukannya dengan total nilai emisi sebesar Rp. 263,77 miliar rupiah. Meskipun total nilai emisi tersebut hanya sebesar 24% dari keseluruhan nilai emisi penawaran umum perdana, namun hal ini cukup menggembirakan karena pada umumnya perusahaan kecil dan menengah memiliki struktur modal yang kuat

### Shares public offering

During 2001, Bapepam has granted declaration of effectiveness for 31 initial public offerings, 13 public offerings with pre-emptive rights, 6 bond offerings, and approval on share buy back for 8 Issuers. In addition, Bapepam has also granted declaration of effectiveness for 1 registration statement filed by a public company. In total, the value of shares issuance in 2001 was Rp. 5,275,708,831,800, whereas bond issuance has raised a total of Rp. 2.875 billion. Compared with the numbers in 2000, there was an increase on the total number of issuers. Yet, in term of total value of issuance there was a decline whereby in 2001 shares offering and bond issuance amassed Rp. 19.37 trillion and Rp. 5.6 trillion respectively.

One of the phenomena that highlighted the Indonesian Capital Market development in 2001 was the increase participation of small and medium enterprises. Whereas in 2000 there were 6 small and medium enterprises conducting public offering, the number jumped to 16 enterprises in 2001 with the total value of issuance Rp. 263.77 billion. Even though this total value was only contributed to 24% of the total value of initial public offering in the same year, yet it had its significance.

The increase of share offering by those small and medium enterprises was due to their financial strength and debts that were not denominated in foreign currencies. The more corporations armed with this kind of financial soundness the more vigorous Indonesian Capital Market would be.

## Penawaran Umum

dimana hutang-hutangnya tidak didominasi oleh mata uang asing. Semakin banyak perusahaan dengan struktur modal yang kuat di pasar modal akan membuat Pasar Modal Indonesia menjadi semakin sehat.

Fenomena lain yang ada selama tahun 2001 adalah pengaruh langsung dari tumbuhnya Usaha Ekonomi Baru (New Economy Business) berupa usaha-usaha teknologi informasi dan e-commerce. Hal ini terlihat dari makin banyaknya perusahaan dibidang teknologi informasi dan e-commerce yang menggunakan pasar modal sebagai alternatif sumber pendanaan usahanya. Dari Penawaran Umum Perdana 12 perusahaan menengah kecil diatas, 7 diantaranya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang teknologi informasi dan e-commerce.

### Restrukturisasi

Meskipun krisis ekonomi sudah muncul sejak tahun 1997, namun dampaknya masih terasa hingga tahun 2001. Hal ini terlihat dari masih banyaknya emiten/perusahaan publik kesulitan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka. Keadaan ini menyebabkan emiten/perusahaan publik tersebut harus melakukan restrukturisasi hutang-hutang mereka.

Berdasarkan data laporan keterbukaan yang disampaikan pada Bapepam, terlihat bahwa sekitar 44% dari keseluruhan emiten/perusahaan pada tahun 2001 melakukan restrukturisasi atas hutang-hutang mereka. Dari jumlah tersebut, kurang lebih setengahnya melakukan restrukturisasi sebagian hutangnya dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan kurang lebih 19% melakukannya melalui Prakarsa Jakarta.

Another phenomenon in the year 2001 was the exceptional growth of information technology and e-commerce oriented companies, which was a direct impact of New Economy Business. This can be noticed by the upsurge in number of those type of companies that made use of capital market as their financing alternative. From the total number of 12 initial public offerings of small and medium enterprises, 7 were from companies that operated in the field of information technology and e-commerce.

### Restructuring

It has been a long time since economic crisis , which started in 1997, struck, nevertheless the impact was still felt in 2001. It reflected in a number of issuers that faced difficulties in meeting their liabilities. These kind of condition forced a number of issuers/public companies to restructure their debts. Based on disclosure reports data submitted to Bapepam, 44% of total number of issuers in 2001 exercised debts restructuring. Approximately half of the percentage displayed, performing debt restructuring through Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) and 19% of the percentage through Jakarta Initiative.

**Corporate Action emiten/perusahaan publik dalam rangka restrukturisasi hutang**  
Issuers' corporate action with regard to debt restructuring is as follows

<b>Corporate Actions</b>	<b>Jumlah Emiten Number of Issuers</b>
Penawaran Umum Perdana Initial Public Offering	32
Penawaran Umum Saham dengan HMETD Public Offering With Pre-Emptive Rights	13
Penawaran Umum Obligasi Bond Offering	6

Berdasarkan penelaahan Bapepam, dari seluruh emiten/perusahaan publik yang melakukan restrukturisasi sebagian hutangnya dengan BPPN ataupun melalui Prakarsa Jakarta, sekitar 32% telah berhasil menyelesaikan restrukturisasi mereka dan sisanya masih dalam proses restrukturisasi, baik tahap negosiasi awal maupun sampai dengan tahap MoU.

Dari 13 emiten yang melakukan Penawaran Umum Saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, terdapat 2 emiten yang melakukannya dalam rangka restrukturisasi hutang, yaitu PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk dan PT Davomas Indonesia Tbk. Selain itu terdapat 5 emiten yang melakukan Penawaran Umum tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka restrukturisasi hutang-hutang mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pasar modal merupakan sarana yang dipercaya untuk menyelesaikan hutang-hutang mereka.

Mengingat bahwa kesehatan pasar modal sangat bergantung dari kualitas kesehatan emiten/perusahaan publik tersebut, Bapepam sangat berkepentingan untuk memastikan bahwa emiten/perusahaan publik tersebut berhasil melakukan

Based on Bapepam review on all issuers/public companies that restructured part of their debt through IBRA or Jakarta Initiative, about 32% succeeded in their restructuring and the rest still undergoing the initial negotiation or MoU stage of the restructuring process.

From 13 Public Offerings with Pre-emptive Right, there were 2 Issuers, i.e. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. and PT Davomas Indonesia Tbk that conducted the offering in order to restructure their debts. In addition, there were 5 Issuers that conducted Public Offering without Pre-emptive Right as a way of restructuring their debts. It points out that capital market is a reliable alternative for debt restructuring.

Since the soundness of a capital market depends upon the strength of the Issuers/Public Companies involved in, Bapepam is very much concerned to make sure that debt restructuring of those companies is carried out successfully. To further support the realization of Issuers'/Public Companies' debt restructuring, Bapepam revised a number of rules such as Rule

## Penawaran Umum

restrukturisasi hutang-hutang mereka. Untuk itu Bapepam mengeluarkan dan merevisi beberapa peraturan guna mendukung pelaksanaan restrukturisasi hutang emiten/perusahaan publik, seperti Peraturan No. IX. D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Peraturan No. IX.H.1 tentang Pengambil Alihan Perusahaan Terbuka, dan Peraturan No. IX.F.1 tentang Penawaran Tender.

### Pembelian Kembali Saham

Tercatat 8 emiten yang melakukan buy back pada tahun 2001. Alasan utama dilakukannya buy back oleh emiten adalah untuk meningkatkan harga saham emiten-emiten tersebut.

Dalam melakukan buy back ini emiten harus mengikuti antara lain UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dan Peraturan Bapepam No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

### Akuisisi

Pada tahun 2001, emiten/perusahaan publik yang melakukan akuisisi adalah PT Bahtera Adimina Samudra Tbk. Perusahaan ini melakukan akuisisi terhadap PT Intergalaxy Deltafi Series dan PT Mega Galaxy. Kemudian PT Trafindo Perkasa Tbk melakukan akuisisi terhadap PT Bintang Terang Gemilang. Akuisisi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut merupakan akuisisi terhadap pihak yang sebelumnya tidak memiliki hubungan afiliasi.

IX.D.4 concerning Capital Increases Without Pre-emptive Rights, Rule IX.E.2 concerning Material Transaction and Changes of Main Business Activity, Rule IX. H.1 concerning Take Over of Open Company, and rule IX.F.1 concerning Tender Offer.

### Share Buy Back

There were 8 Issuers that carried out share buy back in 2001. The primary reason behind the buy back was to support the shares price of those issuers.

In buy back, Issuers must follow a number of existing rules and regulation such as Law Number 1 Year 1995 concerning Limited Liability Company, Law Number 8 Year 1995 concerning Capital Market, and Bapepam Rule No. XI.B.2 concerning Repurchases of Shares that Have Been Issued by an Issuer or Public Company.

### Acquisition

During 2001, one of the Issuers/Public Companies that conducted acquisition was PT Bahtera Adimina Samudra Tbk. This company acquired PT Intergalaxy Deltafi Series and PT Mega Galaxy. Other company was PT Trafindo that acquired PT Bintang Terang Gemilang. Acquisitions by these two companies were targeted to non-affiliated companies.

Selain itu terdapat 4 akuisisi yang mengandung benturan kepentingan karena akuisisi dilakukan pada pihak yang terafiliasi. Akuisisi-akuisisi tersebut adalah akuisisi oleh PT Indosat terhadap PT Aplikanusa Lintasarta, akuisisi oleh PT Telkom terhadap PT Dayamitra Telekomunikasi, akuisisi oleh PT Myohdotcom Indonesia terhadap 3 perusahaan afiliasi yaitu PT Asiamaya, PT Celicom Indonesia dan PT Java Indonesia, serta PT Arwana Citramulia Tbk yang melakukan akuisisi terhadap PT Sinar Karya Duta Abadi.

#### **Perubahan Kegiatan Usaha/Penghentian Lini Usaha Emiten atau Perusahaan Publik**

Dalam tahun 2001 terdapat 2 emiten yang melakukan perubahan kegiatan usaha utama / penghentian lini usaha. Sedangkan jumlah emiten yang melakukan divestasi yang material berjumlah 4 emiten.

Dalam melakukan perubahan kegiatan usaha dan transaksi yang material, emiten / perusahaan publik wajib memenuhi Peraturan Bapepam No. IX.E.2 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, dan Peraturan Bapepam No. X.K.1 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik.

#### **Privatisasi BUMN**

Privatisasi PT Kimia Farma (Persero) Tbk dan PT Indofarma (Perseroan) Tbk telah menambah lagi deretan BUMN yang masuk ke pasar modal. Beberapa BUMN yang telah masuk pasar modal sebelumnya adalah PT Semen Gresik, Telkom, Indosat, PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, dan PT Bank BNI.

In addition, there were 4 more acquisitions in 2001 with conflict of interest because the target were affiliated companies. Those acquisitions were acquisition of PT Indosat on PT Aplikanusa Lintasarta, PT Telkom on PT Dayamitra Telekomunikasi, PT Myohdotcom Indonesia on 3 affiliates, i.e. PT Asiamaya, PT Celicom, and PT Java Indonesia, and the acquisition of PT Arwana Citramulia Tbk on PT Sinar Karya Duta Abadi.

#### **Changes in Main Business Activity/Discontinue of Business Line of Issuers or Public Companies**

In 2001, two (2) issuers changed their main business activity/terminated their business. Meanwhile, there were four (4) issuers that performed material divestment.

In changing main business activity/ discontinuing business lines, Issuers/Public Companies must comply with Bapepam Rule No. IX.E.2 concerning Material Transaction and Changes in Main Business Activity, and X.K.1 concerning Disclosure of Information that must be made Public Immediately.

#### **Privatization of State Owned Enterprises**

Privatization of PT Kimia Farma Tbk and PT Indofarma contributed to a wave of privatization of State Owned Enterprises through capital market. State Owned Enterprises that made the similar move earlier included PT Semen Gresik, PT Telkom, PT Indosat, PT Tambang Timah, PT Aneka Tambang, and PT Bank BNI.

## Public Offering

### Penawaran Umum

Masuknya BUMN ke pasar modal merupakan hal yang sangat positif baik bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia, bagi BUMN yang bersangkutan, maupun bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Bagi pasar modal, masuknya BUMN memberikan kontribusi yang besar dalam hal peningkatan indeks harga saham gabungan, peningkatan nilai kapitalisasi pasar dan jumlah saham beredar. Bagi BUMN yang bersangkutan, pasar modal memberikan manfaat dalam peningkatan efisiensi perusahaan. Hal ini karena prinsip-prinsip good corporate governance yang terkandung dalam peraturan-peraturan Bapepam sangat membantu tercapainya tingkat efisiensi yang lebih baik. Semua ini pada akhirnya akan membantu meningkatkan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

#### Penelaahan Laporan

Penelaahan dilakukan terhadap laporan yang sifatnya berkala seperti laporan keuangan, laporan penggunaan dana, laporan tahunan, dan juga laporan yang sifatnya insidental. Penelaahan dilakukan untuk melihat kepatuhan terhadap waktu penyampaian dan juga kepatuhan terhadap standar pengungkapan di dalam laporan.

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan, dari keseluruhan emiten/perusahaan publik tercatat 89 perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dan 26 perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian Laporan Tahunan. Hal ini menggambarkan adanya peningkatan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban penyampaian laporan berkala jika dibandingkan dengan kepatuhan pada tahun 2000 di mana emiten/perusahaan publik yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sejumlah 92 perusahaan dan untuk penyampaian Laporan Tahunan sejumlah 96 perusahaan.

The active participation of State Owned Enterprises in the capital market is an advantage for the development of the capital market, for the State Owned Enterprises themselves, and for Indonesian economy in general.

For the capital market, State Owned Enterprises have played a big role in lifting up composite price index, increasing market capitalization value and the number of floating shares. For the State Owned Enterprises, capital market has provided a way to improve corporate efficiency. This efficiency is achieved through the practice of good corporate governance principles contained in Bapepam rules. This will eventually lead to an expansion of Indonesian economy as a whole.

#### Report Analysis

Analysis is conducted on reports submitted periodically such as financial statement, reports of the utilization of funds received from a public offering and annual report, as well as incidental reports. Analysis is carried out to observe the compliance of the reports with regard to both the timeliness of the submission and the standard of disclosure.

Based on the analysis, 89 companies were late to submit their Financial Statement. This condition depicted an increased obedience of issuers/public companies to submit their periodical reports compared to those of number in year 2000 where 92 companies were accounted for late reporting of Annual Financial Statement, and 96 companies accounted for Annual Report late reporting.

# Reksa Dana & Manajer Investasi

## Investment Fund & Investment Manager

### Strategi :

- Memberdayakan Reksa Dana
- Menyederhanakan perizinan, pendaftaran, persetujuan, dan pelaporan

### Yang Kami Lakukan :

- Memproses permohonan izin usaha, pembinaan dan pengawasan Reksa Dana, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, dan Penasihat Investasi
- Menelaah aspek keterbukaan, hukum, akuntansi pernyataan pendaftaran Reksa Dana
- Melakukan pemeriksaan rutin terhadap Manajer Investasi pengelola reksa dana dan Manajer Investasi yang belum melakukan kegiatan (pasif)

### Yang Kami Capai

- Memberikan pernyataan efektif kepada 19 Reksa Dana
- Memberikan izin usaha kepada 13 Manajer Investasi
- Memberikan izin orang perseorangan kepada 205 Wakil Manajer Investasi
- Memberikan izin perseorangan kepada 559 Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana
- Mencabut izin usaha 3 Manajer Investasi
- Memberikan sanksi administrasi 8 Manajer Investasi

### Rencana ke Depan

Memisahkan kegiatan perusahaan efek sebagai penjamin emisi efek dan perantara pedagang efek dengan kegiatan perusahaan efek sebagai manajer investasi

### Our Strategies

- Empowering Investment Funds
- Simplifying the process of licensing, registration, approval, and reporting

### What We do

- Processing business license application, and supervising Investment Funds, Investment Managers, Investment Manager Representatives, and Investment Advisors
- Reviewing disclosure, legal aspects, accounting aspects, of registration statements of Investment Funds
- Performing routine inspection on Investment Managers of Investment Funds and inactive Investment Managers

### What We Have Accomplished

- Issued declaration of effectiveness for 19 Investment Funds
- Issued business licenses for 13 Investment Managers
- Issued individual licenses for 205 Investment Manager Representatives
- Issued 559 Investment Funds Sales Agent Representatives
- Revoked business licenses of 3 Investment Managers
- Imposed administration sanction on 8 Investment Managers

### Outlook

Separating Securities Companies that act as Underwriters and Broker-Dealers with Securities Companies that act as Investment Managers.

## Reksa Dana & Manajer Investasi

### Reksa Dana

Reksa dana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.

Jumlah reksa dana di Indonesia hingga tahun 2001 mencapai 108 terdiri dari 107 reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan 1 (satu) reksa dana berbentuk perseroan tertutup. Selama tahun 2001 jumlah reksa dana yang diterbitkan para Manajer Investasi sebanyak 19 reksa dana. Sementara itu, yang membubarkan diri sebanyak 5 reksa dana.

Sementara itu nilai aktiva bersih yang berhasil dihimpun reksa dana hingga tahun ini mencapai sekitar Rp 8 triliun. Nilai tersebut meningkat 44,93% apabila dibandingkan dengan tahun 2000 yang mencapai Rp 5,52 triliun. Kontribusi terbesar dalam penghimpunan dana tersebut dilakukan oleh reksa dana jenis pendapatan tetap sebesar 58,23 %, sedang reksa dana pasar uang sebesar 27,70%, reksa dana campuran 7,94% dan reksa dana saham 6,13 %.

Reksa dana pendapatan tetap merupakan reksa dana yang mengalami peningkatan jumlah paling besar yaitu 27,78% menjadi 46 buah. Reksa dana campuran naik 11,54% menjadi 29 buah, reksa dana pasar uang naik 11,1% menjadi 10 buah. Sementara itu reksa dana saham berkurang 11,54 % menjadi 23 reksa dana.

Jumlah pemodal yang melakukan investasi pada industri reksadana di tahun 2001 mencapai sekitar 51.723 pemodal. Jumlah ini meningkat sekitar 30,99% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 39.487 pihak.

### Investment Fund

An Investment Fund is a vehicle used by an investment manager to gather funds from the public to be invested in a securities portfolio.

By the end of 2001 the number of investment funds in Indonesia was 108, consisted of 107 collective investment fund contracts and 1 corporate investment fund. Investment fund growth in 2001 was indicated by the launching of 19 new investment funds. Nevertheless, there were 5 investment funds terminated their business.

The total net asset value demonstrated an upward trend. Up to year 2001, the total Net Asset Value was Rp. 8 trillion, or increased by 44.93 % compared to that of previous year, which was Rp. 5,52 trillion. Of the total funds collected, 58.23% was in Fixed Income Funds, 27.70% was in Money Market Funds, 7.94% was in Balanced Funds, and 6.13% was in Equity Funds.

In the year of 2001, Fixed Income Funds is the type of fund that has the highest growth. The number of Fixed Income Funds in year 2001 was 46, or increased by 27.78 % compared to that of year 2000. Meanwhile the number of balanced funds was 29, or increased by 11.54%, and the number of money market funds was 10, or increased by 11.1 % compared to that of previous year. Nevertheless, the number of Equity Fund was 23, or decreased by 11.54 % .

In 2001, the number of investors of investment funds were 49.635. This number was increased by 30.99 % compared to that of previous year, which amounted to 39.487 investors.

Selanjutnya untuk mengawasi kegiatan internal control pada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 11 Manajer Investasi.

Dalam upaya memperluas akses pemasaran reksa dana di Indonesia agar dapat menjangkau investor ritel, beberapa bank kustodian yang telah merangkap sebagai agen penjual reksa dana mengembangkan fasilitas online banking terutama melalui automatic teller machine (ATM). Melalui ATM diharapkan nasabah lebih mudah dalam melakukan transaksi atas unit penyertaan reksa dana.

### Manajer Investasi

Manajer Investasi merupakan pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tahun 2001 jumlah Manajer Investasi di Indonesia berjumlah 79. Dari jumlah tersebut, Manajer Investasi yang mengelola dana nasabah (discretionary funds) terdapat 52 manajer investasi. Jumlah ini mengalami kenaikan 10,64% dibandingkan tahun 2000 yang mencapai 47 Manajer Investasi.

Pada tahun 2001, jumlah dana nasabah yang dikelola oleh perusahaan Manajer Investasi mencapai Rp 14,93 triliun atau naik 45,69 % dibanding tahun sebelumnya yang baru mencapai Rp 10,25 triliun.

Further in order to supervise the internal control of Investment Manager, Bapepam has inspected 11 Investment Managers.

As an effort to broaden the market of investment funds in Indonesia, several custodian banks which also act as selling agents have established online banking facility, mainly through automatic teller machine (ATM). This facility provides an easy access to investment fund transaction.

### Investment Manager

An Investment Manager is a person that manages clients fund or manages securities portfolios or collective investment portfolios for clients or groups of clients, other than insurance companies, pension funds or bank with respect to their own lawful activities.

In year 2001, the number of registered investment managers in Indonesia were 79. From this number, 52 investment managers managed investor's fund. Compared to that of year 2000 which were only 47 investment managers, the number increased by 10.64%.

In year 2001, the amount of fund managed by investment managers was Rp. 14.93 trillion. This amount showed an increased by 45.69% compared to that of year 2000 which was Rp. 10.25 trillion.

## Reksa Dana & Manajer Investasi

### Investment Fund & Investment Manager

Sementara itu jumlah nasabah yang dananya dikelola Manajer Investasi per Nopember 2001 sekitar 445 nasabah, terdiri dari 320 nasabah lembaga (310 nasabah dalam negeri, 10 nasabah luar negeri). Secara keseluruhan jumlah nasabah Manajer Investasi mengalami kenaikan 9,61% dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 406 nasabah

Perusahaan Manajer Investasi yang memberikan jasa sebagai penasihat investasi sebanyak 20 perusahaan. Sedang jumlah nasabah yang meminta jasa nasehat berjumlah 140 nasabah. Dari jumlah tersebut sebanyak 83 adalah nasabah lembaga (63 nasabah dalam negeri, 20 nasabah luar negeri) dan 57 nasabah adalah perseorangan (24 nasabah dalam negeri, 33 nasabah luar negeri). Sementara itu Manajer Investasi yang mengelola reksa dana berjumlah 30.

Untuk meningkatkan integritas pasar modal, selama tahun 2001 Bapepam telah melakukan pemeriksaan rutin kepada 18 manajer investasi. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 3 Manajer Investasi yang dicabut izin usahanya, sedang 8 Manajer Investasi dikenai sanksi administratif.

The number of investors managed by investment managers as of November 2001 were 445 investors. This number consisted of 320 institutional investors, among with 10 were foreign institutional investors. As a whole, the number of investors in 2001 increased by 9.61 % compared to that of previous year, which was 406 investors.

The number of investment managers that provide services as investment advisor was 20 companies, while the number of clients asking for advise was 140 clients. Among those 140 clients, 83 were institutional investors (63 domestic investors and 20 foreign investors) and 57 were individual investors (24 domestic investors and 33 foreign investors). Meanwhile, the number of investment manager that manage investment fund was 30.

In order to enhance capital market integrity, during 2001 Bapepam had conducted routine inspection to 18 investment managers. As a result, 3 investment managers' licenses were revoked and 8 investment managers were impose with administrative sanction.

# Perusahaan Efek & Lembaga Bursa

## Securities Companies & SRO's

### Strategi :

- Memberdayakan pelaku pasar modal khususnya SRO's, Perusahaan Efek, dan Wakil Perusahaan Efek
- Mendorong penerapan sistem perdagangan jarak jauh (online trading)
- Menyederhanakan perizinan, pendaftaran, persetujuan, dan pelaporan

### Yang Kami Lakukan

- Pembinaan dan pengawasan kegiatan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penjamin Emisi Efek, dan Perantara Pedagang Efek
- Pembinaan dan pengawasan kegiatan Wakil Penjamin Emisi Efek dan Wakil Perantara Pedagang Efek
- Pemeriksaan atas Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek
- Pengawasan atas transaksi Efek di Bursa Efek dan di luar Bursa Efek

### Yang Kami Capai

- Memberikan izin kepada 5 Perusahaan Efek, dan 1 kustodian
- Memberikan izin kepada 1525 Wakil Perantara Pedagang Efek,
- Mencabut izin 7 Perusahaan Efek
- Melakukan pemeriksaan operasional terhadap PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
- Menyetujui 2 peraturan Bursa Efek Jakarta
- Menyetujui 2 peraturan Bursa Efek Surabaya

### Rencana Ke Depan

- Mempersiapkan demutualisasi Lembaga Bursa Efek
- Mempersiapkan Bisnis Model Perusahaan Efek

### Our Strategies

- Empowering market participants especially SRO's, Securities Companies, Securities Company Representatives
- Encouraging the implementation of remote trading and on-line trading system
- Simplifying the procedures for licencing, registering, approval, and reporting process

### What We Do

- Regulating and supervising activities of Stock Exchanges, Clearing Guarantee Corporation, Central Securities Depository, and Securities Companies (broker-dealer and underwriter)
- Regulating and Supervising activities of Securities Company Representatives
- Conducting Operational and Financial Auditing on Stock Exchanges, Clearing Guarantee Corporation, Central Securities Depository, and Securities Companies
- Conducting Surveillance on securities transactions both on-exchange and off-exchange

### What We Have Accomplished

- Issued licenses for 5 Securities Companies as Broker-dealer and 1 as Custodian
- Issued licenses for 1525 Securities Companies Representatives
- Revoked 7 licenses of Securities Companies as Broker-dealer and or Underwriter
- Conducted 1 routine technical audit on Central Securities Depository
- Approved 2 amendment rules for JSX
- Approved 2 amendment rules for SSX

### Outlook

- Preparing Demutualization of the Stock Exchanges
- Preparing Securities Company Business Model

### Perusahaan Efek

Pada tahun 2001, Bapepam telah memberikan izin usaha baru kepada 5 Perusahaan Efek, 4 diantaranya sebagai Perantara Pedagang Efek (PPE) dan 1 Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek (PEE). Sementara itu terdapat 11 Perusahaan Efek yang membuka 24 kantor di lokasi lain sehingga sampai dengan akhir tahun terdapat 78 Perusahaan Efek yang memiliki kantor di lokasi lain dengan jumlah kantor sebanyak 246 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Di samping itu terdapat 3 Perusahaan Efek yang ditingkatkan izin usahanya dari PPE menjadi Penjamin Emisi Efek (PEE). Sebaliknya, selama tahun 2001 terdapat 7 Perusahaan Efek yang dicabut izin usahanya sebagai PPE dan atau PEE. Dengan demikian, jumlah Perusahaan Efek yang telah diberikan izin usaha oleh Bapepam selama tahun 2001 adalah sejumlah 202 Perusahaan Efek.

Selama tahun 2001, Bapepam telah mengeluarkan 1525 izin baru kepada orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek (WPE) atau meningkat sekitar 32,5% dibandingkan tahun 2000. Dengan demikian, jumlah orang perseorangan yang telah memperoleh izin dari Bapepam sampai tahun 2001 telah berjumlah 6.431 orang dengan rincian sebanyak 3.197 orang sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE), 970 orang sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek (WPEE), 1.132 orang sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI), dan 1.132 orang sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (WAPERD).

Untuk meningkatkan profesionalisme WPE, setiap direksi yang memiliki izin WPE diwajibkan untuk mengikuti pendidikan lanjutan. Dalam pelaksanaannya, Bapepam menginstruksikan

### Securities Companies

During the year 2001, Bapepam has issued 5 licenses for Securities Companies, 4 as Broker Dealer and 1 as Underwriter. Meanwhile, 11 Securities Companies has opened 24 branch offices in other locations, thus until the end of the year there were 78 Securities Companies that have branch offices all around the country with the total of 246 branches.

Besides, 3 Securities Company licenses have been extended from Broker Dealer to Underwriter. Nevertheless, in year 2001 Bapepam has revoked 7 Securities Company licenses as Broker Dealer and or Underwriter. Thus, by the end of year 2001, Bapepam has granted licenses to 202 Securities Companies.

During the year, Bapepam has issued 1,525 new individual licenses as Securities Company Representatives or increase 32.5 % compared to those of previous year. Therefore, by year 2001, there were 6431 individual licenses that have been issued which consisted of licenses for 3197 Broker Dealer Representatives, 970 Underwriter Representatives, 1,132 Investment Manager Representatives and 1,132 Investment Fund Sales Agents.

To improve professionalism of Securities Company Representatives, the Directors of Securities Companies holding individual licenses from Bapepam is required to take advance training. Bapepam has ordered the Committee for Capital Market Professional Standards (PSP) in cooperation with Association of Indonesian Securities Companies (APEI) to facilitate the training program. In addition, the application

Panitia Standar Profesi Pasar Modal bekerja sama dengan APEI. Proses perolehan izin WPE tidak hanya dilakukan di Jakarta tetapi juga dilakukan di daerah secara kolektif dan terkoordinasi.

Sebagai wujud dari komitmen Pasar Modal Indonesia untuk liberalisasi kepemilikan saham Perusahaan Efek Indonesia oleh investor asing menyongsong era pasar bebas, maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 90/KMK.010/2001 tanggal 10 Pebruari 2001 tentang Pemilikan Saham Perusahaan Efek oleh Pemodal Asing yang memungkinkan badan hukum asing yang bergerak di bidang sekuritas memiliki saham Perusahaan Efek Indonesia sampai dengan 99% dari modal disetor.

#### **Pengembangan Model Bisnis Perusahaan Efek.**

Selama lima tahun terakhir kondisi Perusahaan Efek di Indonesia mengalami penurunan yang sangat memprihatinkan, baik dari sisi kondisi keuangan maupun kinerjanya. Untuk mengatasi kondisi ini diperlukan adanya restrukturisasi dan reposisi bisnis Perusahaan Efek.

Menyikapi kondisi tersebut, berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-19/PM/2001 tanggal 23 Oktober 2001 dibentuk Tim Pengkajian Pengembangan Perusahaan Efek. Tujuan dari pembentukan Tim ini adalah untuk melakukan pengkajian terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan operasional Perusahaan Efek seperti aspek kinerja, aspek permodalan, aspek kualitas sumber daya manusia maupun aspek teknologi informasi dalam rangka menentukan konsep model bisnis Perusahaan Efek di Indonesia.

for individual licenses can be done, collectively, not only in Jakarta but also in other locations.

In realizing Indonesian Capital Market commitment to liberalize Indonesian securities company shares ownership by foreign investors in the era of free market, the Minister of Finance Decree No. 90/KMK.010/2001 regarding Ownership of Securities Company Shares by Foreign Investors has been issued on February 10, 2001. Under this rule foreign legal entity doing business in securities may own Indonesian Securities Company shares up to 99% of paid in capital.

#### **Development of Securities Company Business Model**

In the last five years, the condition of Securities Companies in Indonesia has been decreasing dramatically, both financially and operationally. To cope with this condition, it is a need for restructuring and repositioning of Securities Company business.

To respond to this situation, a Bapepam-SRO Team on Development of Securities Companies has been established based on Chairman of Bapepam Decree No. 19/PM/2001 dated October 23, 2001. The objective of establishing this Team is to conduct a study on aspects with respect to Securities Company operational, such as performance, capital, quality of human resources and information technology to develop a concept of business model for Securities Company in Indonesia.

Selama tahun 2001, Tim telah melakukan pengumpulan data dan informasi yang akan digunakan sebagai bahan analisa dan pengkajian dalam perumusan konsep bisnis Perusahaan Efek di Indonesia dan diharapkan akan selesai triwulan pertama tahun 2002.

### Lembaga Bursa

Dalam rangka memberikan alternatif investasi bagi pemodal serta untuk menyesuaikan kebutuhan Pasar Modal Indonesia, BEJ dan BES telah menyusun beberapa peraturan dan perubahan peraturan yang meliputi Peraturan Pencatatan Efek, Perdagangan Efek, dan Keanggotaan. Terdapat 2 (dua) perubahan peraturan BEJ yang disetujui Bapepam selama Tahun 2001, yaitu perubahan peraturan keanggotaan BEJ tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa dan Perubahan Peraturan Pencatatan Efek secara Umum terkait dengan persyaratan pengangkatan Komite Audit oleh Perusahaan Tercatat.

Sementara itu pada tahun yang sama, Bapepam menyetujui 2 (dua) peraturan dan perubahan peraturan BES yaitu Peraturan Perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) dan Keanggotaan. Peraturan ini mengubah persyaratan keanggotaan dan menambah beberapa ketentuan dan persyaratan khusus bagi Anggota Bursa yang akan menjadi pemain dalam perdagangan KBIE.

Selanjutnya dalam rangka menunjang pelaksanaan perdagangan KBIE, KPEI mengeluarkan peraturan Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi KBIE dan juga peraturan tentang Pinjam Meminjam Efek Tanpa Warkat yang akan menjadi pedoman bagi Anggota kliring untuk melaksanakan transaksi pinjam meminjam Efek

In the year 2001, the Team has collected data and information that will be analyzed and processed to determine a concept of Securities Company business model. Hopefully, the report will be ready by the first quarter of year 2002.

### Self Regulation Organization

To provide alternative investment for investors and to meet capital market needs, JSX and SSX have proposed new rules and amended existing rules regarding Listing, Trading and Membership. In the year 2001, Bapepam has approved amendment of 2 JSX Rules. The first one was Membership Rule related to Auction and Buy Back of Stock Exchange Shares, and the second one was Listing Rules related to the requirement for listed company to have an Audit Committee.

Meanwhile, Bapepam has also approved SSX new Rules regarding Trading of Index Future Contracts (TIFC) and amendment of rule on membership. This rule revised membership requirements and added specific provisions and requirements for Exchange Members willing to participate in TIFC trading.

Furthermore, to support TIFC trading activities, CGC has issued a new Rule regarding Clearing and Settlement Guarantee of TIFC Transaction and Rule regarding Scripless Securities Lending and Borrowing as a guidance for Clearing Members in exercising securities lending and borrowing transaction through a system and mechanism developed by CGC. Bapepam has approved these two rules after discussions with CGC and other related SROs.

melalui sistem dan mekanisme KPEI. Kedua peraturan tersebut telah disetujui Bapepam, setelah sebelumnya dibahas bersama antara Bapepam dan KPEI serta Pihak SRO lain terkait.

Dalam tahun 2001, Bapepam bersama dengan PT BES dan Forum Akuntan Pasar Modal telah menyelesaikan pengkajian dan pembahasan untuk menyusun Pedoman Akuntansi Perusahaan Efek (PAPE) berkaitan dengan pencatatan transaksi atas KBIE yang diperdagangkan di BES. Diharapkan PAPE ini dapat disosialisasikan kepada pelaku pasar awal tahun 2002.

Selanjutnya sebagai salah satu upaya untuk melakukan pembinaan terhadap SRO, pada tahun 2001 Bapepam melakukan pemeriksaan operasional terhadap PT KSEI. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan SRO.

### Penyempurnaan Regulasi

Sebagai upaya untuk meningkatkan integritas dan kualitas manajemen bursa guna lebih meningkatkan kesiapan dan kemampuan bursa efek nasional dalam menghadapi era persaingan bursa global ke depan, maka dilakukan penyempurnaan Peraturan Bapepam Nomor III.A.3 tentang Komisaris dan Direksi Bursa Efek. Di samping itu, perubahan peraturan ini juga dimaksudkan agar manajemen bursa mampu menjadi penggerak sekaligus dinamisor penerapan tata kelola perusahaan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance yang harus dianut dan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh emiten dan pelaku pasar modal lainnya.

In year 2001, Bapepam, SSX and Capital Market Accountants Forum have finished reviewing the draft of accountancy guidance for securities company related to record on transaction of TIFC traded in SSX. It was expected that the guidance will be introduce to the market participants by early 2002.

To ensure the compliance of SRO with Capital market law and regulations, Bapepam has conducted an operational audit on CSD

### Regulatory Improvement

To promote integrity and quality of the Stock Exchange management so that it increases the readiness of national Stock Exchanges in facing global competition, Bapepam has amended Bapepam Rule No. III.A.3 regarding Commissioners and Directors of the Stock Exchanges. Besides, the revision of this rule was also intended to put stock exchanges as the activator in implementation of good corporate governance principles which is expectedly followed by other capital market participants.

### Preparation of Demutualization of the Stock Exchanges

To achieve Indonesian capital market mission as stated in the Indonesian Capital Market Blue Print of 2000-2004 and due to capital market condition with in the last few years, it deems necessary to redefine Development Targets of Indonesian capital market. This is aimed at improving the capability of domestic market confronting the incoming global competition. One of the important Development Targets is

## Perusahaan Efek & Lembaga Bursa

### Persiapan Demutualisasi Bursa Efek.

Dalam upaya pencapaian misi Pasar Modal Indonesia sebagaimana tertuang dalam Blue Print Pasar Modal Indonesia 2000-2004, dan mengacu pada kondisi pasar modal selama beberapa tahun terakhir maka diperlukan pendefinisian ulang Sasaran Pengembangan sehingga dapat menjawab tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat dalam satu dekade terakhir. Salah satu sasaran pengembangan yang utama adalah restrukturisasi Lembaga Bursa Efek Indonesia (Bursa Efek, LKP, LPP) yang diikuti dengan demutualisasi yang pada dasarnya melakukan pemisahan antara kepemilikan saham dan keanggotaan/pengguna jasa serta perubahan orientasi bisnis dari nir laba menjadi berorientasi pada laba.

Menyikapi perubahan paradigma lembaga ke bursa tersebut, dibentuk Tim Studi Demutualisasi Lembaga Bursa Efek yang beranggotakan wakil-wakil dari Bapepam dan SRO berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-10/PM/2001 tanggal 1 Agustus 2001 yang kemudian disesuaikan dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-18/PM/2001 tanggal 5 Oktober 2001. Tim tersebut telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang bersifat umum dan khusus yang akan digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan kebijakan dalam penerapan Demutualisasi Bursa Efek di Indonesia. Adapun beberapa rekomendasi yang bersifat umum meliputi :

the restructuring of SROs (Stock Exchange, Clearing Guarantee Corporation, and Central Securities Depository) followed by demutualization of the Stock Exchanges. This demutualization is basically intended to separate share ownership and membership or user of Stock Exchange Services and to change its business orientation from non-profit-oriented company to profit-oriented company.

To respond to the paradigm shift of the SRO's, a Bapepam-SRO Team on Demutualization of Stock Exchanges has been established based on Chairman of Bapepam Decree No. 10/PM/2001 dated August 1, 2001 as amended by Chairman of Bapepam Decree No. 18/PM/2001 dated October 5, 2001. Furthermore, the Team has proposed some recommendations consisting general and specific recommendations. These recommendations will be used as one of basic considerations in making policies on the implementation of demutualization of Stock Exchanges in Indonesia. The general recommendations consist of:

1. Rekomendasi perlunya penerapan Demutualisasi

Demutualisasi lembaga Bursa Efek perlu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dana lembaga Bursa Efek, pengembangan produk dan infrastruktur kelembagaan, terciptanya good corporate governance, peningkatan nilai saham lembaga Bursa, pengembangan pasar, dan sarana pelepasan kepemilikan saham.

2. Rekomendasi Model

Model Alternatif kelembagaan Bursa yang dipilih berdasarkan analisa SWOT dan penilaian Tim dengan menggunakan skala Likert adalah model Demutualisasi "Operating Holding Non Self Regulatory Organization".

3. Rekomendasi Tahapan Implementasi

Rekomendasi Implementasi dibagi menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu:

- Sosialisasi Hasil Kajian Tim Studi Demutualisasi Lembaga Bursa Efek
- Pembentukan Komite Restrukturisasi SRO (Komite SRO) dan Komite Pendirian Perusahaan Induk (Komite PI)
- Implementasi Pembentukan Perusahaan Induk
- Pengembangan Usaha dan Penyebaran Kepemilikan

Sedangkan beberapa rekomendasi Tim yang bersifat khusus terdiri dari hal-hal khusus yang perlu mendapat perhatian dalam implementasi demutualisasi lembaga Bursa Efek seperti kepemilikan, good corporate governance, bisnis dan operasinya, sumber daya manusia, dan teknologi informasi.

1. Recommendation on the need of demutualization.

Demutualization of the Stock Exchange is needed in order to provide proper financing for the exchanges, to develop products and institutional infrastructures, to implement good corporate governance principles, to increase value of Stock Exchange shares, to develop market, and to provide vehicle for share divestment.

2. Recommendation on Model for Demutualized Exchanges

The recommended model for Stock Exchange demutualization chosen based on SWOT analysis and evaluation conducted by the Team using Likert scale is "Operating Holding Non Self Regulatory Organization (SRO)"

3. Recommendation on Implementation Steps

The Implementation was divided into 4 steps, as follows:

- Socialization of Team's result
- Establishment of committee for SRO restructuring and committee for holding establishment
- Establishment of holding
- Business development and distribution of ownership

The specific recommendations relate to aspects of implementation of demutualization such as ownership, good corporate governance, business and operation, human resources, and information technology.

### Pengawasan Transaksi Efek

Bapepam melaksanakan tugas pemantauan terhadap aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek melalui fasilitas Real Time Information (RTI), Indonesian Market Quote (IMQ), Stock Watch, Internet, dan beberapa media cetak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bapepam selalu berkoordinasi dengan bagian Surveillance Bursa Efek melalui e-mail, untuk perlu tidaknya diambil tindakan segera (seperti suspensi oleh Bursa Efek) apabila terjadi hal-hal yang mengandung indikasi adanya transaksi yang tidak wajar. Setiap ditemukan adanya indikasi transaksi yang tidak wajar, akan diinformasikan kepada Bursa Efek untuk dilakukan penelitian awal dan melaporkan hasilnya kepada Bapepam. Apabila berdasarkan penelaahan Bapepam atas penelitian dilakukan BEJ dapat disimpulkan adanya bukti-bukti dugaan pelanggaran, maka hasil penelaahan tersebut selanjutnya akan dilimpahkan ke biro Pemeriksaan dan Penyidikan untuk dilakukan proses pemeriksaan atau penyidikan.

Selama tahun 2001, Bapepam telah menginformasikan 5 (lima) indikasi perdagangan yang tidak wajar kepada Bursa Efek Jakarta untuk ditindaklanjuti, serta 7 (tujuh) kasus telah dilimpahkan ke Biro Pemeriksaan dan Penyidikan. Motif dari transaksi tidak wajar selama tahun 2001 adalah perdagangan semu dimana tidak terjadi perpindahan kepemilikan Efek.

### Market Surveillance

Market Surveillance Division of Bapepam supervises trading activities on the Stock Exchanges by using Real Time Information (RTI), Indonesian Market Quote (IMQ), Stock Watch, Internet facilities as well as mass media.

To perform its task, Market Surveillance Division has always coordinated with Surveillance Division of the Stock Exchanges through e-mail to decide whether certain action (i.e. suspension) is necessary when there is an indication of unusual transaction. Should any unusual transaction were observe, it will be informed to the Stock Exchange for preliminary investigation. The stock exchange will submit investigation report to Bapepam to be reviewed by Surveillance Division. Should the review lead to evidences of alleged violation, the case then will be delivered to Enforcement Bureau for further investigation.

During year 2001, Market Surveillance Division of Bapepam has informed 5 indications of unusual transactions to be followed up with preliminary investigation by the Jakarta Stock Exchange, and 7 cases have been delivered over to Law Enforcement Bureau of Bapepam for formal investigation. Most of unusual transaction in 2001 were related to selling and buying shares without transfer of ownership of the shares.

## Good Corporate Governance

Penerapan corporate governance oleh para pelaku pasar modal masih menjadi pokok perhatian Bapepam yang harus terus ditingkatkan. Berbagai inisiatif atau langkah-langkah telah diambil sepanjang tahun 2001 guna mendukung kebijakan Bapepam dalam area ini, mulai dari yang bersifat strategis seperti dimasukkan klausul mengenai kewajiban pemenuhan good corporate governance dalam Rancangan UU Pasar Modal yang baru, sampai dengan kebijakan yang bersifat teknis operasional meliputi revisi berbagai peraturan Bapepam dan penyelenggaraan berbagai kegiatan seminar/workshop.

Dalam RUU Pasar Modal yang baru, Bapepam mengusulkan bahwa seluruh pelaku pasar modal wajib memenuhi prinsip-prinsip good corporate governance dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, Bapepam juga memasukkan klausul yang mewajibkan Emiten/ Perusahaan Publik untuk memiliki Komisaris Independen dan Direktur Independen, Komite Audit, serta Sekretaris Perusahaan. Di samping itu, Bapepam juga akan menerbitkan Pedoman Penyajian Laporan Keuangan bagi Emiten/Perusahaan Publik untuk Industri Khusus yang keseluruhannya akan meliputi 22 jenis industri.

Pada tahun 2002, Bapepam mulai menerbitkan pedoman untuk dua industri yaitu manufaktur dan investasi. Dengan penerbitan pedoman ini diharapkan perusahaan akan semakin meningkatkan kualitas keterbukaan informasi, baik keuangan maupun non keuangan, kepada investor dan publik.

The implementation of good corporate governance (GCG) by capital market participants still becomes one of main issues that Bapepam has to pay attention. Numerous initiatives and steps have been taken during year 2001 to support Bapepam's policies in this area. One strategic step was putting the capital market participants' obligation of fulfilling the GCG principles clause in the capital market law amendment. Further, one of operationally technical steps that has been put into action included the amendment of some Bapepam's rules to synchronize with the GCG principles and the organization of various seminar and workshops.

Bapepam has stated in the new draft of capital market law the obligation of all capital market participants to fulfill the GCG principles in carrying out their business. Besides, Bapepam also requires Issuers and public companies to employ independent commissioners and directors, audit committee, and corporate secretary in their firms' management. Further, Bapepam will also establish a series guidance on financial statement presentation for Issuers of specific industries which amounts to 22 types of industries.

In year 2002, Bapepam will start introducing guidances for manufacturing and investment industries. It is expected that these guidances will improve the quality of information disclosure, either financial or non financial information, to investors and public.

## Pengembangan Organisasi

### Pendidikan

Di bidang pendidikan, selama tahun 2001 sebanyak 3 orang pegawai Bapepam telah menyelesaikan tugas belajar di Luar Negeri untuk program Master, sehingga total pegawai Bapepam yang mempunyai latar belakang pendidikan S2 berjumlah 65 orang atau sebesar 14,58 % dari total pegawai Bapepam yang berjumlah 446 orang.

Di samping itu, pada tahun 2001, 3 pegawai Bapepam mengikuti Diklat persiapan pendidikan program *master* di luar negeri. Melalui kerjasama dengan Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Bapepam mengikutsertakan sejumlah 7 orang pegawai untuk mengikuti program Magister Manajemen. Sementara itu 11 orang pegawai Bapepam mengikuti tugas belajar program pendidikan master di luar negeri serta 1 orang untuk program doktor.

### Training dan Seminar

Di samping program pendidikan jangka panjang, Bapepam bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB), Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) dan lembaga luar negeri lainnya seperti JICA, JBIC, KOICA, ADBI, dan FIMA untuk mengirimkan pegawainya mengikuti training dan seminar baik di dalam negeri maupun luar negeri.

### Pelayanan Informasi

Meskipun kondisi perekonomian kurang mendukung bagi perkembangan pasar modal, tidak menyurutkan langkah Bapepam untuk terus melaksanakan sosialisasi pasar modal kepada berbagai kalangan. Demikian pula halnya dengan

### Education

Throughout year 2001, three (3) of Bapepam employees have finished their study in Postgraduate overseas program, which bring the total number of Bapepam employees holding Master Degree to 65 or 14,58% of total 446 employees.

Three (3) of Bapepam employees have just started with their short course preparation for postgraduate overseas program. Collaborating with Gadjah Mada University, Bapepam enlisted seven (7) of its employees to attend Magister Management program in the University. Meanwhile, 11 employees are still studying abroad to finish their postgraduate program, and one (1) employee is pursuing his doctoral abroad.

### Training and Seminar

Besides longterm educational program, Bapepam collaborate with Asian Development Bank (ADB), Finance Education and Training Agency (BPPK) and other foreign institutions such as JICA, JBIC, KOICA, ADBI, and FIMA to send its employees to attend training and seminars both in the country and abroad.

### Information Services

Although the current conditions were not sufficient for supporting the development of capital market, it did not discourage Bapepam from continuously conducting capital market socialization to public. Furthermore, public interest in capital market increased especially among college students.

semakin banyaknya minat masyarakat terutama mahasiswa untuk mengenal pasar modal.

Selama tahun 2001 telah dilaksanakan 12 kali penyuluhan yang antara lain ditujukan kepada Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Hukum Bisnis Universitas Padjadjaran, Notariat Pendidikan Program Spesialis I Notarat Fakultas Hukum - Universitas Padjadjaran, STIE INABA Bandung, Universitas Widya Wiwaha Yogyakarta. Sosialisasi juga diberikan kepada Pemenang Kejuaraan Stock Exchange Game BES dan Pengelola PIPM Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari kerjasama Bapepam dengan POLRI, Bapepam memberikan penyuluhan pasar modal kepada Widya Wisata Siswa Pendidikan Kejuruan Lanjutan Perwira Monbank Angkatan I Tahun 2001 dan Widya Wisata Siswa Pendidikan Kejuruan Lanjutan Perwira Penyidik Perbankan Tahun 2001, Dediklat POLRI, Sekolah Reserse dan Intelkam Megamendung.

Besarnya minat masyarakat terutama mahasiswa juga terlihat dari semakin banyaknya penelitian, penulisan skripsi, thesis dll tentang pasar modal. Selama tahun 2001 Bapepam telah memberikan surat izin penelitian kepada 50 mahasiswa.

### **Bidang Penelitian**

Badan Pengawas Pasar Modal melalui Proyek Peningkatan Efisiensi Pasar Modal, pada tahun 2001 telah melakukan penelitian di bidang pasar modal. Ke-3 studi penelitian tersebut adalah studi tentang :

1. Demutualisasi Bursa Efek Indonesia
2. Pengawasan Pengelolaan Portofolio Reksa Dana di Pasar Modal Indonesia
3. Komitmen pasar modal terhadap kesepakatan ASEAN, WTO, dan IOSCO

From 12 socialization programs conducted throughout the year, some of the programs were for University of Indonesia, Postgraduate Program of Business Law of University of Padjajaran, Notary of Faculty of Law - University of Padjajaran, STIE INABA Bandung, University of Widya Wiwaha Yogyakarta. Other socialization was also arranged for the winner of BES' Stock Exchange Game Competition and managers of PIPM in various provinces.

To continue cooperation between Bapepam and National Police, Bapepam organized educational programs concerning capital market for Widya Wisata students of Lanpa Monbank year 2001 of National Police, Widya Wisata of Banking Investigator Officer Advanced Course year 2001, short course in National Police, School for Reserse, and Intelkam Megamendung.

The increasing interest of public especially among college students toward capital market reflected in more study, research, and thesis concerning capital market been conducted. Throughout the year, Bapepam granted permission for fifty (50) college students to conduct capital market research in Bapepam.

### **Research**

Bapepam, through Capital Market Improvement Project, in year 2001 has done 3 capital market studies. Those studies include :

1. Indonesian Stock Exchange Demutualization
2. Supervision of Mutual Fund Portfolio Management in Indonesian Capital Market
3. Capital Market Commitment towards ASEAN, WTO, and IOSCO Organization.

### Rapat Kerja

Di usia 24 tahun pembentukannya, banyak perubahan fundamental yang telah terjadi, baik dari sisi industri, regulasi, maupun organisasi Bapepam. Perubahan-perubahan tersebut perlu disikapi secara serius oleh Bapepam. Dalam rangka mengantisipasi perubahan tersebut maka Bapepam mengadakan rapat kerja dari tanggal 1 s.d. 3 Nopember 2001, yang bertema : “ Dengan Rapat Kerja 2001, Kita Bangun Komitmen dan Kebersamaan Menuju Lembaga Pengawas yang Kredibel dan Tangguh Dalam Menghadapi Dinamika dan Tantangan Di Masa Depan”. Dengan melakukan introspeksi terhadap berbagai permasalahan internal Bapepam baik permasalahan teknis maupun sebagai lembaga pengawas diharapkan Bapepam dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan lebih efisien dan efektif.

### Office Assembly

Twenty four years since the capital market has been reestablished, many fundamental changes happened, whether the changes in the industry, regulations, and organization of Bapepam. Those changes need to be seriously taken in to account by Bapepam. In order to cope with the changes on 1<sup>st</sup> - 3<sup>rd</sup> November 2001 Bapepam arranged an office assembly titling “With Bapepam Assembly 2001, We build Commitment and Togetherness toward a Tough and Credible Supervisory Institution to Cope with Dynamics and Challenges of the Future.” Through introspection of many internal problems whether technical or as a supervisory institution, it is expected that Bapepam can conduct its function and tasks more efficiently and effectively.

# Organisasi

## Organization

**Sekretariat** Bapepam mempunyai tugas utama memberikan pelayanan teknis dan administrasi demi kelancaran tugas Bapepam

**The executive Secretary** of Bapepam is responsible for providing administrative and technical support to Bapepam

**Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum** bertanggung jawab menyusun peraturan, menetapkan sanksi, memberikan bantuan hukum, melakukan litigasi, memberikan saran dan pendapat dari segi hukum atas masalah yang berkaitan dengan pasar modal, serta pembinaan dan pengawasan profesi hukum pasar modal.

**The Regulation and Legal Counsel Bureau** is responsible for drafting rules, imposing sanctions, providing legal counsel, litigating, providing legal advises and recommendations for issues related to capital market area, as well as supervising the Capital Market legal professionals.

**Biro Pemeriksaan dan Penyidikan** mempunyai tugas menegakkan hukum di bidang transaksi dan lembaga efek, pengelolaan investasi, keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, dan melaksanakan kerjasama internasional di bidang pemeriksaan dan penyidikan.

**The Enforcement Bureau** is responsible for enforcing the Capital Market Law enforcement in securities transactions and institutions, Issuers and Public Companies disclosure, and coordinating international affairs for Bapepam.

**Biro Pengelolaan Investasi dan Riset** mempunyai tugas memproses izin usaha, membina dan mengawasi Reksa Dana, Manajer Investasi, Wakil Manajer Investasi, Penasihat Investasi, Wali Amanat, Penilai, dan menelaah keterbukaan pernyataan pendaftaran Reksa Dana serta melaksanakan riset pasar modal

**Investment Management and Research Bureau** is responsible for registration processing and supervision of mutual funds, investment managers investment manager representatives, investment advisors, trusts agents, appraisals. This Bureau also responsible for reviewing the disclosure of mutual funds registration statements and performing capital market researches.

**Biro Transaksi dan Lembaga Efek** mempunyai tugas memproses perizinan atau persetujuan, membina dan mengawasi Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, Biro Administrasi Efek, Kustodian, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, Wakil Penjamin Emisi Efek, Wakil Perantara Pedagang Efek, serta mengawasi transaksi Efek.

**Market Institutions and Trading Bureau** is responsible for registration processing and supervision of securities exchanges, clearing guarantee institution, central securities depository, securities administration agencies, custodians, underwriters, securities companies, underwriter representatives, and securities company representatives. This Bureau is also responsible for supervising securities trading.

**Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa** mempunyai tugas membina, mengawasi dan menelaah keterbukaan informasi Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di bidang jasa, kecuali Emiten Reksa Dana.

**The Corporate Finance for Services Industry Bureau** is responsible for supervising and reviewing the information disclosure of Issuers and Public Companies in services industry, except for Investment Funds Issuers.

**Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Rill** mempunyai tugas membina, mengawasi dan menelaah keterbukaan informasi Emiten dan Perusahaan Publik yang bergerak di bidang produksi barang.

**The Corporate Finance for Manufacturing Industry Bureau** is responsible for supervising and reviewing the information disclosure of Issuers and Public Companies in manufacturing industry.

**Biro Standar Akuntansi** mempunyai tugas menyusun dan mengembangkan standar akuntansi, standar pemeriksaan bidang akuntansi, serta membina dan mengawasi profesi akuntan di pasar modal.

**The Accounting Standards Bureau** is responsible for formulating and developing accounting and accounting audit standards. This Bureau is also responsible for supervising public accountants in capital market area.

## Pejabat Bapepam Bapepam Officials



Herwidayatmo

Pande Putu Raka

Robinson Simbolon

Abraham Bastari

### **Herwidayatmo**

Ketua / Chairman

Herwidayatmo mulai menjabat sebagai Ketua Bapepam sejak 13 Januari 2000.

Herwidayatmo began his office term as Bapepam Chairman on January 13, 2000.

### **Pande Putu Raka**

Sekretaris / Executive Secretary

Pande Putu Raka memulai menjabat sebagai Sekretaris Bapepam sejak 22 Juni 1998.

Pande Putu Raka became the Executive Secretary of Bapepam since June 22, 1998.

### **Robinson Simbolon**

Kepala Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum  
Director of Regulation and Legal Counsel Bureau

Memimpin Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum Bapepam sejak 1 Oktober 1999.

Robinson Simbolon started his office from term as the Director of Regulation and Legal Counsel Bureau on October 1, 1999.

### **Abraham Bastari**

Kepala Biro Pemeriksaan dan Penyidikan  
Director of Enforcement Bureau

Memimpin Biro Pemeriksaan dan Penyidikan Bapepam sejak 2 Juni 2000.

Appointed to be the Director of the Enforcement Bureau on 2 June, 2000.



Freddy R Saragih

Arys Ilyas

M. Noor Rachman

Indarto

Anis Baridwan

### **Freddy R. Saragih**

Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset

Director of Investment Management and Research Bureau

Freddy R. Saragih menjabat sebagai Kepala Biro Pengelolaan Investasi dan Riset sejak Juni 2000.

Freddy R. Saragih has been the Director of Investment Management and Research Bureau since June 2000.

### **Arys Ilyas**

Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek

Director of Market Institutions and Trading Bureau

Arys Ilyas memimpin Biro Transaksi dan Lembaga Efek sejak 17 November 1997.

Arys Ilyas has led the Market Institutions and Trading Bureau since November 7, 1997

### **M. Noor Rachman**

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Director of the Corporate Finance for Services Industry Bureau

M. Noor Rachman memimpin Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa Bapepam sejak 6 Juni 2000.

M. Noor Rachman has been the Director of the Corporate Finance for Services Industry Bureau since June 6, 2000.

### **Indarto**

Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil

Director of the Corporate Finance for Manufacturing Industry Bureau

Indarto yang memimpin Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil sejak 6 Juni 2000.

Indarto has been the Director of the Corporate Finance for Manufacturing Industry Bureau since June 6, 2000.